



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
LKJIP)TAHUN 2022**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 172

Telp. (0742) 21222 Kuala Tungkal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
	<i>Menguraikan Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tugas, dan fungsi, visi dan misi dan permasalahan yang dihadapi</i>	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
	<i>Menyajikan target – target dan kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021</i>	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja		
	<i>Menyajikan Realisasi Target dan Analisis Kinerja</i>	
B. Realisasi Anggaran		
	<i>Menyajikan Daya Serap Anggaran</i>	
BAB IV PENUTUP	69

Kata Pengantar

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua*

Alhamdulillah rabbil'alamin dengan rahmat-Nya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 berdasarkan PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 merupakan Laporan Kinerja Tahun Pertama dari Periode Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 – 2026 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mengalami revisi pada tahun 2019.

Kuala Tungkal, Maret 2023


PIC. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

H. DAHLAN, S.Sos. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670108 199102 1 001

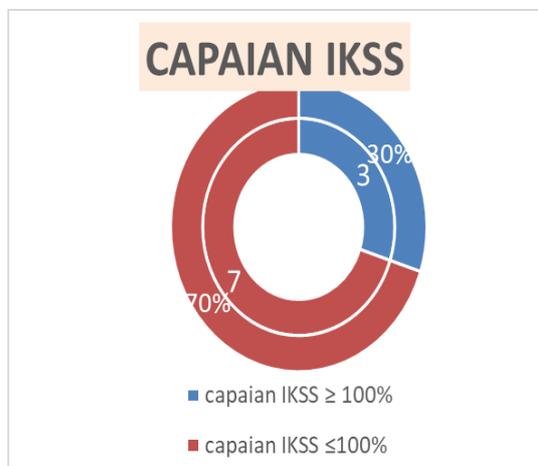
Ikhtisar

Eksekutif

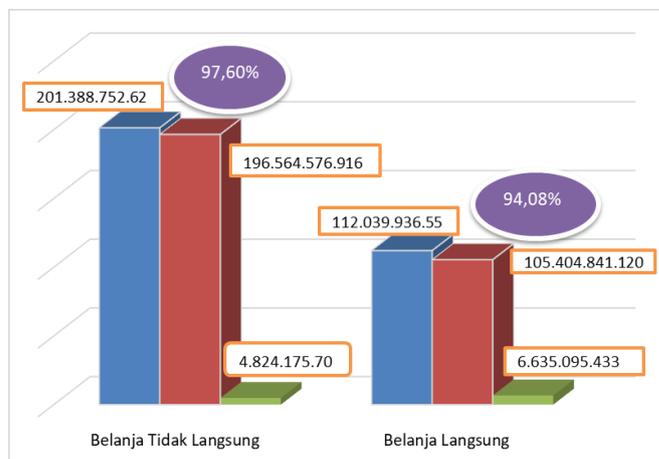
Laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan informasi tingkat pencapaian 6 Sasaran Strategis dengan 10 Indikator Kinerja Utamanya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dan capaian program unggulan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022. Secara umum target yang ditetapkan dapat tercapai dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa Indikator Kinerja yang belum dapat tercapai dapat dilihat dalam diagram dibawah ini :



Ringkasan Capaian IKSS



Kinerja keuangan, Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021



Permasalahan/Kendala

Permasalahan/Kendala

1. Tidak adanya Fungsional kebudayaan pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kurangnya pelaku budaya yang ahli dibidangnya;
3. Belum semua Anak Usia Dini memperoleh layanan PAUD yang berkualitas;
4. Jumlah, Kualifikasi, Kompetensi dan Distribusi Guru belum berada pada Kondisi yang ideal di semua Kecamatan; dan
5. Standar Sarana dan Prasarana Sekolah belum berada pada kondisi ideal.

Upaya Penyelesaian

Upaya penyelesaian

1. **Rekrutmen Fungsional Kebudayaan;**
2. **Pembinaan Pelaku Budaya dan Kelembagaan;**
3. **Peningkatan kualitas Kelembagaan dan Fungsional PAUD;**
4. **Peningkatan Jumlah Guru, Kualifikasi, Kompetensi dan Distribusi Guru; dan**
5. **Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana sesuai SPM.**

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik, jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang tercantum didalam dasar hukum atau aturan organisasi, karenanya, organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang di perolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefensiensikan hasil dari proses organisasi. Yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengendalian dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik (Bastian, 2010: 88).

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja tetapi menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik(Halim, 2007: 13).

Dengan semangat Reformasi Birokrasi tuntutan akan pemerintahan yang baik semakin tinggi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu lembaga teknis yang menjalankan roda pemerintahan dibidang pendidikan. Pada era Otonomi Daerah, Kabupaten/Kota memiliki otonomi yang luas yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah secara efektif telah melaksanakan otonomi daerah dengan

melakukan penataan kelembagaan atau pembentukan Lembaga Perangkat Daerah termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah lembaga yang mendapatkan legitimasi dari rakyat untuk menyelenggarakan fungsi - fungsi pemerintahan dalam melaksanakan program pembangunan dibidang pendidikan wajib mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsinya secara periodik melalui pengembangan sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Selanjutnya mengacu pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis ,Pelaporan dan tatacara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. juga dinyatakan bahwa laporan akuntabilitas kinerja merupakan Laporan Kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas kinerja tersebut nantinya digunakan sebagai bahan evaluasi, penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan periode yang akan datang serta sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada hakekatnya merupakan sinergi dari Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas Proses dan Akuntabilitas Program yang saling mendukung dan saling terkait satu sama lain. Akuntabilitas managerial menitikberatkan pada efisiensi, efektifitas dan kehematan dalam penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas proses menitikberatkan pada kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai misi organisasi. Sedangkan Akuntabilitas program pada dasarnya memberikan perhatian yang besar dalam pencapaian hasil kegiatan instansi pemerintah.

Dalam hal ini seluruh aparat pemerintahan dipandang berkemampuan untuk mencapai hasil sesuai dengan misi yang diembannya, bukan hanya sekedar patuh terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah yang beraneka ragam dan kompleks memerlukan dukungan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, pendanaan yang tidak boros, kerugian dan penyalahgunaan serta menjamin tersedianya data yang dapat dipercaya (akurat) dan dapat disajikan secara memadai dalam suatu laporan secara berkala dan melembaga serta pentingnya pengungkapan proses pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan dengan dinamika interaksinya dengan lingkungan masyarakat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sebagai media informasi sekaligus bentuk akuntabilitas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun.

Terselenggaranya Good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka akuntabilitas kerja diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, transparan, komprehensif dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

B. DASAR HUKUM

Sebagai Dasar Hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 Tentang pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
17. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016 Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten tanjung Jabung Barat Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 ini adalah :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAPORAN KINERJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 1 tahun (Tahun Anggaran 2022). sebagai pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Tanjung Jabung Barat, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan masukan dan umpan balik.
2. Sebagai tolok ukur kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang meliputi *Input* (masukan), *Output* (Keluaran), *Outcome* (Hasil), *Benefit* (manfaat) dan *Impact* (dampak).
3. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang pendidikan sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

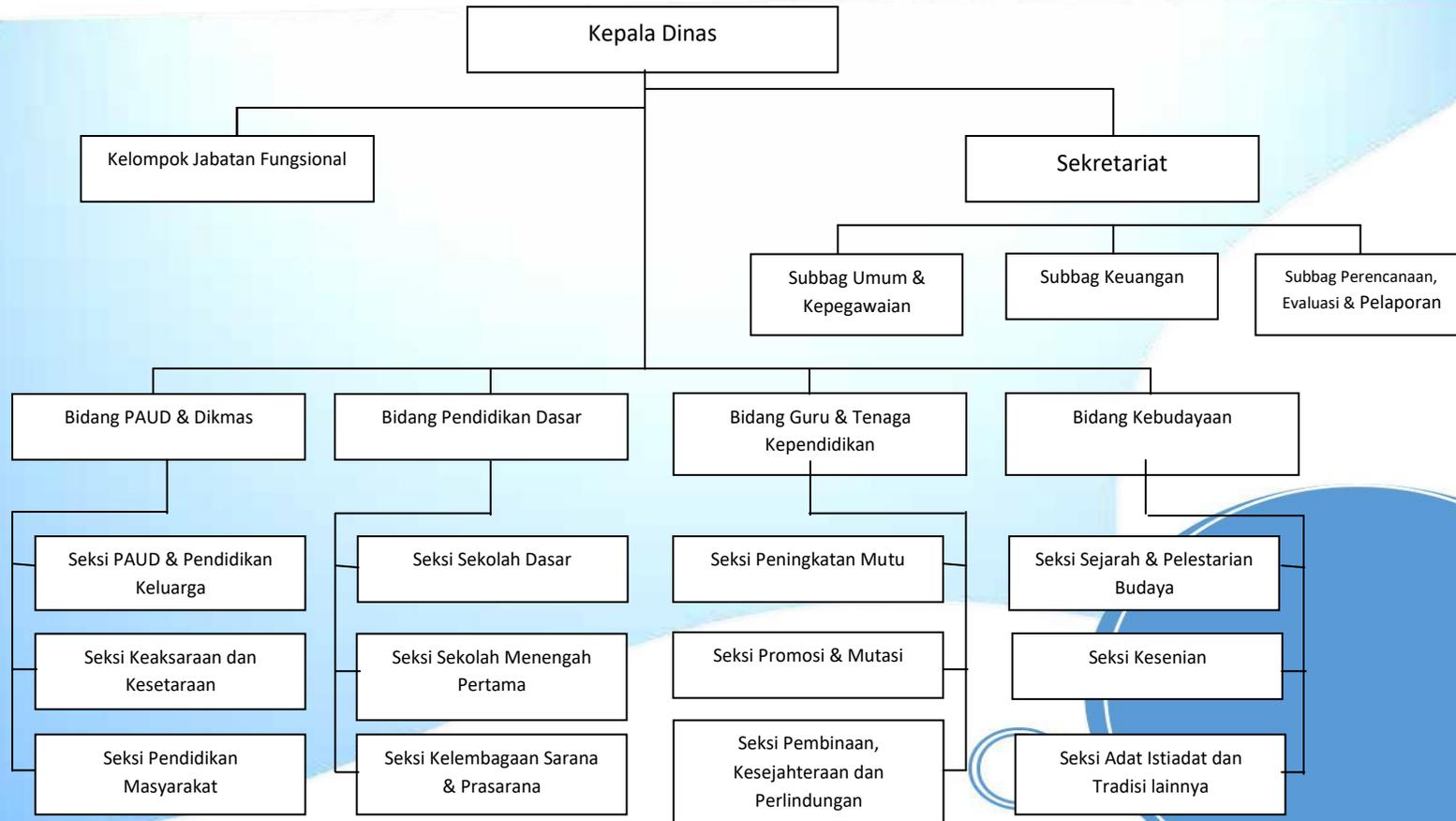
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Peningkatan akuntabilitas instansi;
- b. Umpan balik bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah;
- c. Peningkatan perencanaan di segala bidang, maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi;
- d. Meningkatkan kredibilitas instansi dimana instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
- e. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi;
- f. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- g. Mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat di lingkungannya.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) dan mempedomani Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tanggal 14 Desember 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Program
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sekolah Dasar;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - 3) Seksi Sekolah Menengah Pertama.
- d. Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi PAUD dan Pendidikan Keluarga ;
 - 2) Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan;
 - 3) Seksi Pendidikan masyarakat.
- e. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Peningkatan Mutu;
 - 2) Seksi Promosi dan Mutasi;
 - 3) Seksi Pembinaan, Kesejahteraan dan Perlindungan.
- f. Bidang Kebudayaan
 - 1) Seksi Sejarah dan Pelestarian budaya
 - 2) Seksi Kesenian
 - 3) Seksi Adat Istiadat dan Tradisi Lainnya
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Personalia

Sumber Daya Aparatur (personil) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT							
PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN						JUMLAH
	SMA	D I	D II	D III	S1/DIV	S2	
PENGAWAS	0	0	0	0	21	1	22
PNS	13	1	0	0	26	5	45
NON PNS	24	0	0	1	20	0	45
Jumlah							112
<i>Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020</i>							

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Melaksanakan Tugas Menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pengembangan Kebudayaan.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pengembangan Kebudayaan.
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pengembangan Kebudayaan.
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pengembangan Kebudayaan; dan
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai Catatan bahwa sesuai dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk Pembagian kewenangan antara Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten, Tingkat Pendidikan Menengah (SMA/SMK) serta Pendidikan Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB) telah menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi. Sesuai dengan Kesepakatan, sehingga pada bulan Maret 2017 telah diserahkan ke pemerintahan Provinsi jambi.



■ VISI DAN MISI

a. Visi

Semua Lembaga/Instansi perlu memiliki Visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perumusan Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat mengacu pada tugas Pokok dan Fungsi. Perumusan Visi Dinas Pendidikan mencerminkan apa yg dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yg jelas, mampu menjadi penyatu komponen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta dapat memberikan orientasi kemasa yang akan datang dan komitmen seluruh jajaran untuk pembangunan pendidikan dan Kebudayaan yg berkelanjutan.

Dengan mengacu pada Visi Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, Nawacita dan memperhatikan Visi Kemendikbud 2019 serta Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sudah dibahas pada Bab II sebelumnya maka masih sangat relevan Dinas Pendidikan Kab.Tanjung Jabung Barat menetapkan Visi 2021-2026 :

Visi :

“ Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, Berakhlak, Berbudaya dan Kompetitif “

dari Visi tersebut dapat didefinisikan secara operasional tentang Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai berikut : bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat adalah instansi pemerintah/satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Kab. Tanjung Jabung Barat yang berupaya untuk mewujudkan penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat menjadi manusia yang :

1. Memiliki kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual.
2. Berperilaku sesuai tuntunan agama, norma-norma Budaya yang berlaku di masyarakat dan mematuhi peraturan perundang-undangan yg berlaku.
3. Memiliki pemahaman sekaligus dapat memanfaatkan IPTEK untuk kemaslahatan umat.

4. Memiliki kemampuan untuk memenangi persaingan dari suatu kompetisi atau perlombaan baik nasional maupun internasional.

5. Memiliki kemampuan untuk bergaul dan beradaptasi dalam percaturan dunia global yang serba cepat, sehingga terwujud

b. Misi

Untuk mencapai Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026, ditetapkan 4 (Empat) Misi sebagai berikut:

Kode	Misi (M)
M1	Mewujudkan Akses ketersediaan layanan pendidikan yang meluas, merata dan berkeadilan
M2	Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu serta berdaya saing serta kepastian dalam pelayanan Pendidikan
M3	Mewujudkan Pelestarian Nilai Keragaman dan Penguatan Kelembagaan Kebudayaan
M4	Mewujudkan Optimalisasi Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas Tatakelola Kelembagaan Pendidikan dan Kebudayaan

F. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Adapun **Tujuan Strategis (TS)** Dinas Pendidikan Kab.Tanjung Jabung Barat 2021-2026 :

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS						
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT						
TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PROGRAM
1		2		3		4
T1	Peningkatan Akses layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Dasar	SS1	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	IKSS1.1	Angka melek huruf penduduk Usia 15 - 59 th	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
				IKSS1.2	Angka Rata-rata Lama sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
T2	Peningkatan Mutu Pendidik dan Peserta Didik serta Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter	SS2	Meningkatnya Mutu Layanan dan Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah	IKSS2.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
				IKSS2.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
				IKSS2.3	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		SS3	Meningkatkan Profesionalisme dan distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	IKSS3.1	Persentase Guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya Profesional (Kualifikasi dan Sertifikasi)	Guru dan Tenaga Kependidikan
T3	Peningkatan Pengembangan Kelestarian Nilai dan Keragaman Serta Kelembagaan Kebudayaan	SS4	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Budaya dan pelaku budaya dalam melindungi	IKSS4.1	Persentase Lembaga Budaya yang memiliki legalitas	Pengembangan Nilai Budaya
				IKSS4.2	Jumlah Hasil karya Individu yang memiliki HAKI	Pelestarian dan pengembangan Kebudayaan
T4	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Akuntabilitas Tatakelola Pelayanan Organisasi	SS5	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	IKSS5.1	Nilai AKIP	Manajemen Pelayanan Pendidikan
		SS6	Meningkatkan Ratio Tingkat Graduate SDM masyarakat	IKSS6.1	Jumlah Masyarakat Penerima Beasiswa Prestasi	Pemberian Beasiswa

2. Program dan Indikator Program

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM				
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT				
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	
1		2	3	
IKSS1.1	Angka melek huruf penduduk Usia 15 - 59 th	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	IKP1.1.1	APK PAUD usia 3-6 tahun
			IKP.1.1.2	Persentase Angkatan kerja Muda Mandiri
IKSS1.2	Angka Rata-rata Lama sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	IKP1.2.1	APK SD/MI/Paket A
			IKP1.2.2	APM SD/MI
			IKP1.2.3	APK SMP/Mts/Paket B
			IKP1.2.4	APM SMP/Mts
IKSS2.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	IKP2.1.1	Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah SD
			IKP2.1.2	Persentase SD berakreditasi Minimal B
IKSS2.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	IKP2.2.1	Rata-Rata Nilai Ujian Nasional SMP
		Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	IKP2.2.2	Persentase SMP berakreditasi Minimal B
IKSS2.3	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
IKSS3.1	Persentase Guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya Profesional (Kualifikasi dan Sertifikasi)	Guru dan Tenaga Kependidikan	IKP3.1.1	Persentase GTK yang memiliki Indeks Kinerja Baik
		Guru dan Tenaga Kependidikan	IKP3.1.2	Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan SIMPKB
IKSS4.1	Persentase Lembaga Budaya yang memiliki legalitas	Program Pengembangan Nilai Budaya	IKP4.1.1	Jumlah benda cagar budaya yang ditetapkan
IKSS4.2	Jumlah Hasil karya Individu yang memiliki HAKI	Program pelestarian dan pengembangan Kebudayaan	IKP4.2.1	Jumlah Pelaku Pelestari Budaya
		Program pelestarian dan pengembangan Kebudayaan	IKP4.2.2	Jumlah Pelaku seni Budaya bersertifikasi
IKSS5.1	Nilai AKIP	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	IKP5.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, laporan Instansi yang dikirim
IKSS6.1	Jumlah Masyarakat Penerima Beasiswa Prestasi	Program Pemberian Beasiswa	IKP6.1.1	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi

Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2021.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (*performance gap*) kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyajian LAPORAN KINERJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN : Menguraikan gambaran umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tugas dan fungsi, visi, misi dan maksud dan tujuan penyusunan LAPORAN KINERJA serta sistematika penyajian.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA : Menyajikan Rencana Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA : Menyajikan capaian kinerja organisasi dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan.
BAB IV	PENUTUP : Menyajikan ringkasan capaian kinerja tahun 2021 serta pemecahan masalah untuk perbaikan kinerja ditahun yang akan datang.
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2021 yang sudah tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2020 ini. Untuk mengukur kinerja program pembangunan pendidikan diatas, Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersusun dalam 4 Tujuan, 6 Sasaran Strategis dan 10 Indikator Kinerja Sasaran sekaligus tergetnya sebagai parameter keberhasilan pada masing-masing pilar tersebut.

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026:

VISI

“Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, berakhlak, berbudaya dan Kompetitif”

Kode	Misi (M)
M1	Mewujudkan Akses ketersediaan layanan pendidikan yg meluas,merata dan berkeadilan
M2	Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu serta berdaya saing serta kepastian dalam pelayanan Pendidikan
M3	Mewujudkan Pelestarian Nilai Keragaman dan Penguatan Kelembagaan Kebudayaan
M4	Mewujudkan Optimalisasi Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitasi Tatakelola Kelembagaan Pendidikan dan Kebudayaan



INDIKATOR KINERJA UTAMA						
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020						
TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	
1		2		3	4	
T1	Peningkatan Akses layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Dasar	SS1	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	IKSS1.1	Angka melek huruf penduduk Usia 15 - 59 th	98,60%
				IKSS1.2	Angka Rata-rata Lama sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	7,87 tahun
T2	Peningkatan Mutu Pendidik dan Peserta Didik serta Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter	SS2	Meningkatnya Mutu Layanan dan Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah	IKSS2.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%
				IKSS2.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,89%
				IKSS2.3	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,11%
		SS3	Meningkatkan Profesionallisme dan distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	IKSS3.1	Persentase Guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya Profesional (Kualifikasi dan Sertifikasi)	99,23%
T3	Peningkatan Pengembangan Kelestarian Nilai dan Keragaman Serta Kelembagaan Kebudayaan	SS4	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Budaya dan pelaku budaya dalam melindungi	IKSS4.1	Persentase Lembaga Budaya yang memiliki legalitas	2,93%
				IKSS4.2	Jumlah Hasil karya Individu yang memiliki HAKI	1 Karya
T4	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Akuntabilitas Tatakelola Pelayanan Organisasi	SS5	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	IKSS5.1	Nilai AKIP	70
				SS6	Meningkatkan Ratio Tingkat Graduate SDM masyarakat	IKSS6.1

Untuk menjalankan semua Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2021 diperlukan anggaran dan penetapan Kinerja :

A. anggaran

Pagu Anggaran

Rp.316.431.602.039,-

Realisasi Anggaran

Rp. 298.230.181.159,-

Berikut Anggaran Tiap Program Tahun 2021

Anggaran per Program

NO	PROGRAM	Jumlah
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	1.275.974.726
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	348.400.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	99.450.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	48.750.000
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat	5.110.120.000
6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	47.056.746.000
7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan	12.370.302.000
8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	38.456.773.000
9	Program Pemberian Beasiswa Daerah	1.580.360.000
10	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.185.914.575
11	Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	701.065.000
	11 Program dan 58 Kegiatan	108.233.855.301



PENETAPAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan suatu komitmen antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab dengan pihak yang memberikan tugas dan merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Pada tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Bupati Tanggung Barat, dimana dalam Perjanjian Kinerja tersebut terdiri dari 11 program inti dan 58 kegiatan .

Adapun perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 terdapat dalam tabel Perjanjian Kinerja dibawah ini.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	
1		2	3	
IKSS1.1	Angka melek huruf penduduk Usia 15 - 59 th	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	IKP1.1.1	APK PAUD usia 3-6 tahun
			IKP.1.1.2	Jumlah peserta rumah Bahasa
IKSS1.2	Angka Rata-rata Lama sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	IKP1.2.1	APK SD/MI/Paket A
			IKP1.2.2	APM SD/MI
			IKP1.2.3	APK SMP/Mts/Paket B
			IKP1.2.4	APM SMP/Mts
IKSS2.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	IKP2.1.1	Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah SD
			IKP2.1.2	Persentase SD berakreditasi Minimal B
IKSS2.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	IKP2.2.1	Rata-Rata Nilai Ujian Nasional SMP
			IKP2.2.2	Persentase SMP berakreditasi Minimal B
IKSS3.1	Persentase Guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya Profesional (Kualifikasi dan Sertifikasi)	Guru dan Tenaga Kependidikan	IKP3.1.1	Persentase GTK yang memiliki Indeks Kinerja Baik
			IKP3.1.2	Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan SIMPKB
IKSS4.1	Persentase Lembaga Budaya yang memiliki legalitas	Program Pengembangan Nilai Budaya	IKP4.1.1	Jumlah legalitas grup Seni Budaya
IKSS4.2	Jumlah Hasil karya Individu yang memiliki HAKI	Program pelestarian dan pengembangan Kebudayaan	IKP4.2.1	Jumlah Pelaku Pelestari Budaya
			IKP4.2.2	Jumlah Pelaku seni Budaya bersertifikasi
IKSS5.1	Nilai AKIP	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	IKP5.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, laporan Instansi yang dikirim
IKSS6.1	Jumlah Masyarakat Penerima Beasiswa Prestasi	Program Pemberian Beasiswa	IKP6.1.1	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 4 tujuan, 6 Sasaran Strategis dengan 10 Indikator Kinerja Utama untuk dicapai. Berikut tingkat ketercapaian Kesepuluh sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama tahun 2022.

SS 1

Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan

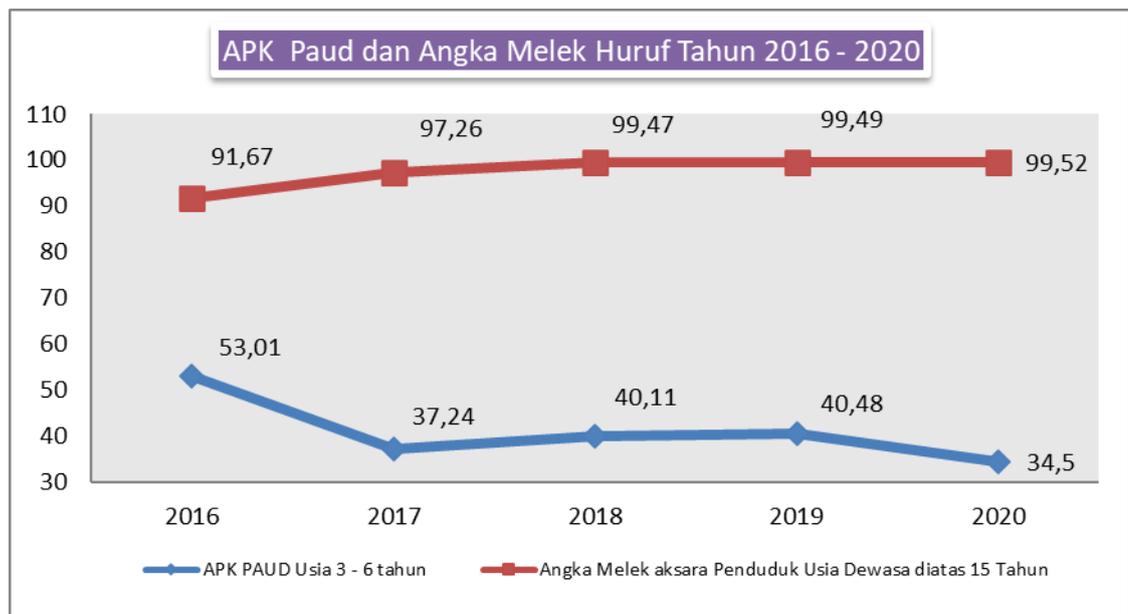
Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat meningkat. Untuk Akses PAUD hampir merata disemua kecamatan, hanya saja banyak yang belum terakreditasi. Berikut tabel jumlah PAUD dan Tutor PAUD per-kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

JUMLAH PAUD, GURU DAN TUTOR PAUD TAHUN 2020								
NO	KECAMATAN	TK	KB	TPA	SPS	JUMLAH	JUMLAH GURU	
							L	P
1	Kec. Batang Asam	14	8	0	0	22	3	95
2	Kec. Betara	3	15	0	5	23	11	84
3	Kec. Bram Itam	1	11	0	3	15	9	64
4	Kec. Kuala Betara	0	14	0	6	20	9	74
5	Kec. Merlung	7	6	0	4	17	0	65
6	Kec. Muara Papalik	5	10	0	0	15	3	49
7	Kec. Pengabuan	1	19	0	4	24	14	83
8	Kec. Renah Mendaluh	5	7	0	0	12	27	35
9	Kec. Seberang Kota	0	11	0	1	12	4	44
10	Kec. Senyerang	1	22	0	0	23	13	82
11	Kec. Tebing Tinggi	12	9	1	0	22	4	98
12	Kec. Tungkal Ilir	15	25	5	9	54	14	268
13	Kec. Tungkal Ulu	6	12	0	0	18	5	60
Jumlah		70	169	6	32	277	116	1101
Jumlah Keseluruhan						277	1217	

Sumber; Bidang PAUD DIKMAS 2020

Tren Capaian APK PAUD dan angka melek huruf berikut dari tahun 2016 – 2020



1. IKSS 1.1 Angka Melek Huruf penduduk usia 15 - 59 tahun

Tabel Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1, Tahun 2020 ini :

SASARAN STRATEGIS	IKSS/IKP	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TAHUN 2020			TARGET AKHIR RENSTRA (2021)
				Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	IKSS1.1	Angka melek huruf penduduk Usia 15 - 59 th	99,49	98,60	99,52	100,93	98,70
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	IKP1.1.1	APK PAUD usia 3-6 tahun	40,56	40,37	34,50	85,46	41,18

Realisasi capaian Angka Melek huruf kinerjanya melampaui target yang ditetapkan. Angka melek huruf penduduk usia dewasa di atas 15 tahun ditargetkan sebesar 98,60%. Dari target tersebut berhasil teralisasi sebesar 99,52%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, capaian kinerja tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,03%. Tercatat angka melek huruf penduduk usia dewasa di atas 15 tahun pada tahun 2018 baru mencapai 97,26%. Capaian tahun 2020 terhadap target akhir renstra 2021 telah mencapai 100% Tercatat angka melek huruf penduduk usia dewasa di atas 15 tahun ditargetkan sebesar 100% diakhir renstra 2021.

Berikut tabel persentase angka melek huruf menurut kecamatan tahun 2020



Persentase Angka Melek Huruf Menurut Kecamatan				
Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2020				
NO	Kecamatan	Jml. Penduduk Usia > 15 th		Angka Melek Huruf (%)
		Jumlah Keseluruhan	Juml. Yg Bisa Baca Tulis	
1	Tungkal Ulu	9.047	9.047	100,00
2	Pengabuan	16.781	16.703	99,54
3	Tungkal Ilir	47.958	47.920	99,92
4	Betara	19.762	19.661	99,49
5	Merlung	11.785	11.720	99,45
6	Batang Asam	20.539	20.478	99,70
7	Tebing Tinggi	31.228	31.160	99,78
8	Renah Mendaluh	9.818	9.698	98,78
9	Muara Papalik	7.964	7.879	98,93
10	Senyerang	15.577	15.490	99,44
11	Bram Itam	10.315	10.239	99,26
12	Seberang Kota	5.771	5.585	96,78
13	Kuala Betara	10.170	10.088	99,19
T a h u n	2020	216.715	215.668	99,52
	2019	216.715	215.614	99,49
	2018	230.198	228.969	99,47
	2017	230.198	223.891	97,26
	2016	202.414	196.842	97,25
	2015	202.414	199.086	98,36
<i>Sumber; Bidang PAUD DIKMAS Dikbud</i>				

Upaya pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan angka melek huruf selain melalui dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Pusat juga memberikan bantuan melalui :

1. bantuan BOP Pendidikan Keaksaraan; dan
2. Peningkatan sarana bagi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) untuk kegiatan literasi masyarakat.

Fokus indikator ini terletak pada meningkatnya anak usia sekolah yang tidak sekolah dan orang dewasa memperoleh layanan Pendidikan Masyarakat yang berkualitas, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan di seluruh Kecamatan.

Dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi penduduk yang kurang mampu sekalipun untuk tidak menempuh pendidikan. Sehingga dapat dipastikan bahwa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah terbebas dari buta huruf penduduk di usia produktif yaitu usia diatas 15 tahun.

Usaha menurunkan penduduk buta huruf, menemui beberapa hambatan dan kendala, di antaranya:

- 1) Lokasi yang terpencil dan Warga Belajar yang masih mengutamakan pekerjaan dari pada belajar;
- 2) Masih ada Kecamatan yang sulit mendapatkan NIK peserta didik;
- 3) Kondisi Usia yang rata – rata di atas 55 Tahun, sehingga keinginan untuk belajar sangat kecil

Untuk mengatasi hal tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan antara lain:

- 1) Sasaran berdasarkan kecamatan yang capaiannya masih rendah
- 2) Dinas pendidikan membuat skala prioritas dari lulusan
- 3) Dinas pendidikan mencari sumber pembiayaan selain APBD

IKP1.1.1

APK PAUD



Akses Masyarakat menjangkau Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat menunjukkan Peningkatan. Peningkatan tersebut terlihat dengan meningkatnya angka Partisipasi Anak Usia 3-6 Tahun pada Tahun 2020 ini. Jika dibandingkan dari awal penetapan renstra APK memang terlihat mengalami penurunan dari tahun 2016 menuju tahun 2020 ini dikarenakan adanya review renstra sekitar pertengahan tahun 2016.

Jika dibandingkan APK PAUD Nasional Tahun 2018 yaitu sebesar 70.10% dan APK PAUD Propinsi Jambi Tahun 2019 yaitu 40,56% maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2020 ini perlu kerja keras untuk mencapainya target tersebut.

SASARAN STRATEGIS	IKSS / IKP	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RENSTRA 2021
				Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	IKP 1.1.1	APK PAUD Usia 3 – 6 Tahun					

“**APK PAUD usia 3-6 tahun**” realisasinya mencapai 34.50%. mengalami penurunan sebesar 6.06 poin dari tahun 2019 yaitu 40.56% sehingganya capaian kinerja juga mengalami penurunan menjadi 85,71%. penurunan kinerja tahun 2020 ini merupakan dampak dari wabah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang telah berlangsung hampir sepanjang tahun 2020 ini.

Jumlah Dana BOP PAUD yang dialokasikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

DANA BOP PAUD TAHUN 2017 - 2021

TAHUN	PESERTA DIDIK		DANA BOP PAUD			Persentase Capaian
	Jumlah Peserta Didik Keseluruhan	Jumlah Peserta Didik yang terlayani	Disalurkan	Terserap	Sisa	
2021						
2020	9.626	8.048	5.775.600.000	4.828.800.000	946.800.000	83,61%
2019	10.309	9.026	6.185.400.000	5.415.600.000	769.800.000	87,55%
2018	8.883	8.860	5.329.800.000	5.316.000.000	13.800.000	99,74%
2017	7.197	7.052	4.318.200.000	4.231.200.000	87.000.000	97,99%

Sumber ; Bidang PAUD DIKMAS

Penurunan serapan dana BOP PAUD dari tahun 2021 yaitu sebesar 3,95% dikarenakan menurunnya jumlah peserta didik, disebabkan adanya pandemi Covid-19.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan APK PAUD anak usia 3-6 tahun pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut :



- a. Pemberian BOP-PAUD Pusat kepada 8.048 anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Pemberian pengadaan alat bermain di tahun 2020 kepada 5 (Lima) Lembaga TK.

Kendala meningkatkan APK PAUD

1. Sebanyak 70% anak usia 6 tahun telah memasuki jenjang pendidikan dasar berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2015.
2. Data anak PAUD belum semuanya terjangkau dalam Dapodik PAUD dan Dikmas disebabkan kendala geografis dan akses internet belum sampai ke daerah-daerah terpencil, sementara banyak lembaga PAUD sudah ada pada tingkat kecamatan dan desa sebagai hasil dari program satu desa satu PAUD.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan akses layanan PAUD antara lain:

1. mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai PP No. 2 Tahun 2018 mengenai SPM Pendidikan; dan
2. mendorong adanya satu data PAUD yang sudah dimulai dengan Perpres No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Kemendikbud telah memulai satu data menggabungkan data PAUD, SD dan SMP di DAPODIK (Data Pokok Pendidikan).

Langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam peningkatan akses layanan PAUD adalah :

1. Mendorong Ibu-Ibu Tim Penggerak PKK di Kecamatan dalam pengelolaan PAUD di Desa/Kelurahan yang merupakan wilayah kewenangannya;
2. Diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pada usia *golden age*/ masa keemasan perlu diberikan stimulus untuk perkembangan kognitif anak;
3. Penataan kelembagaan akan lebih ditingkatkan, terutama dalam hal pembinaan kelembagaan yang belum terjangkau oleh Akses Internet; dan
4. Mendorong Penilik TK/PAUD untuk aktif memonitoring proses pembelajaran.

2. IKSS 1.2 “Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun”

Pada tahun 2020 sama dengan tahun 2019 BPS belum merilis angka rata-rata lama sekolah, Capaian 7.56 tahun merupakan pengukuran tahun 2018. Capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan Sebesar 7,95 tahun. Berikut table IKSS 1.2

SASARAN STRATEGIS	IKSS/ IKP	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TAHUN 2020			TARGET AKHIR RENSTRA (2021)
				Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	IKSS1.2	Angka Rata-rata Lama sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	BPS belum Rilis	7,87 tahun	BPS belum Rilis	0,00	7,95 tahun

IPM dengan Metode Baru dari dimensi pendidikan memasukkan indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2018 masih tergolong rendah yaitu hanya selama 7,56 tahun yang artinya rata-rata penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya menyelesaikan pendidikan sampai kelas 1 atau 2 pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya meningkatkan rata-rata lama sekolah agar IPM terus meningkat melalui program :

1. Pemberian Beasiswa Utusan Daerah yang diberikan bagi siswa/siswi yang berprestasi disekolahnya dan ingin melanjutkan ke Perguruan Tinggi;
2. Pemberian Bantuan biaya Pendidikan kepada siswa siswi yang sedang Kuliah; dan
3. Bantuan untuk sarana dan prasarana.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah, diantaranya :

1. faktor budaya setempat;
2. faktor sosial/tingkat kemiskinan; dan
3. faktor geografi.

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target dapat tercapai antara lain :

1. meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan;
2. melakukan usaha pemberantasan kemiskinan; dan
3. menyelenggarakan sekolah terbuka dengan waktu yang fleksibel.

IKK 1.2.2

Rumah Bahasa

Kegiatan Rumah Bahasa merupakan kegiatan Tambahan di tahun 2018 dan merupakan kegiatan Prioritas Bupati. Rumah Bahasa adalah program yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia di Tanjung Jabung Barat untuk persiapan AFTA dan AEC, dimana dampak AFTA dan AEC akan menyebabkan arus globalisasi dan persaingan ekonomi global akan semakin kuat, maka dari itu pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendirikan Program rumah bahasa. Pengembangan SDM dilakukan dengan memberikan masyarakat kursus bahasa asing yaitu Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang dan Tahfidz Qur'an.

Program Rumah Bahasa belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ukuran dan Tujuan kebijakan belum menunjukkan kejelasan terkait indikator kualitas dan manfaat pelayanan Rumah Bahasa, diantaranya :

1. Sumberdaya manusia sudah cukup memadai untuk Implementasi Program Rumah Bahasa tetapi sumberdaya informasi, keuangan dan fasilitas masih kurang memadai;
2. Karakteristik Agen Pelaksana, respon yang diberikan terhadap program ini sudah cukup baik dan efektif. Namun, pemanfaat program kurang merespon program yang disediakan Rumah Bahasa, sikap atau kecenderungan para peserta didik tidak serius mengikutinya (kehadiran yang tidak konsisten); dan
3. Strategi komunikasi yang kurang efektif, sehingga Program Rumah Bahasa belum diketahui oleh masyarakat luas.

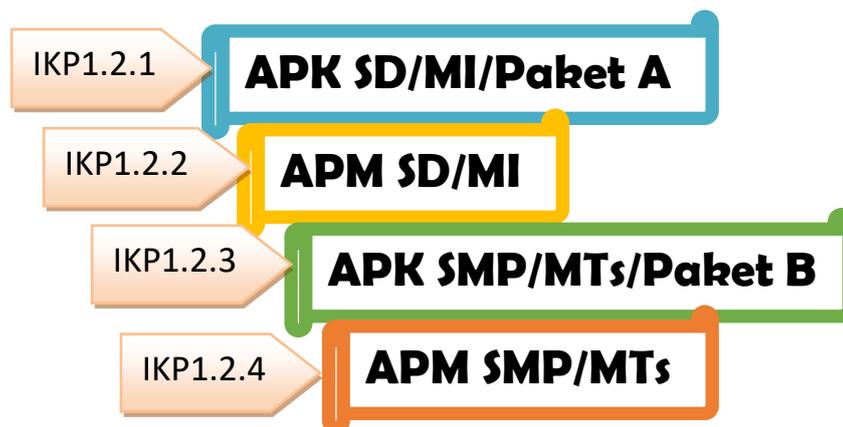
Berikut Tabel Peserta didik rumah Bahasa dari Tahun 2018 – 2021

PESERTA DIDIK RUMAH BAHASA TAHUN 2018- 2020							
NO	URAIAN	JUMLAH PESERTA					JUMLAH
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Bahasa Arab	0	0	35	35	40	110
2	Bahasa Inggris	0	0	21	36	30	87
3	Bahasa Mandarin	0	0	24	10	28	62
4	Tahfidz	0	0	40	38	30	108
Jumlah				120	119	128	367

SASARAN STRATEGIS	IKSS/IKP	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TAHUN 2020			TARGET AKHIR RENSTRA (2021)
				Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	IKK.1.2.2	Jumlah masyarakat yang terbina dalam pengguna Bahasa Asing : -Bahasa Arab -Bahasa Inggris -Bahasa Jepang -Tahfidz Quran	119 Orang	160 Orang	128 Orang	80%	480 Orang

Realisasi Kegiatan Rumah Bahasa sampai dengan tahun 2021 sudah mencapai Orang dari target 480 Orang, atau sebesar 76%. Masih ada 113 Orang atau 24% lagi untuk menuntaskan target akhir renstra yaitu 480 Orang.

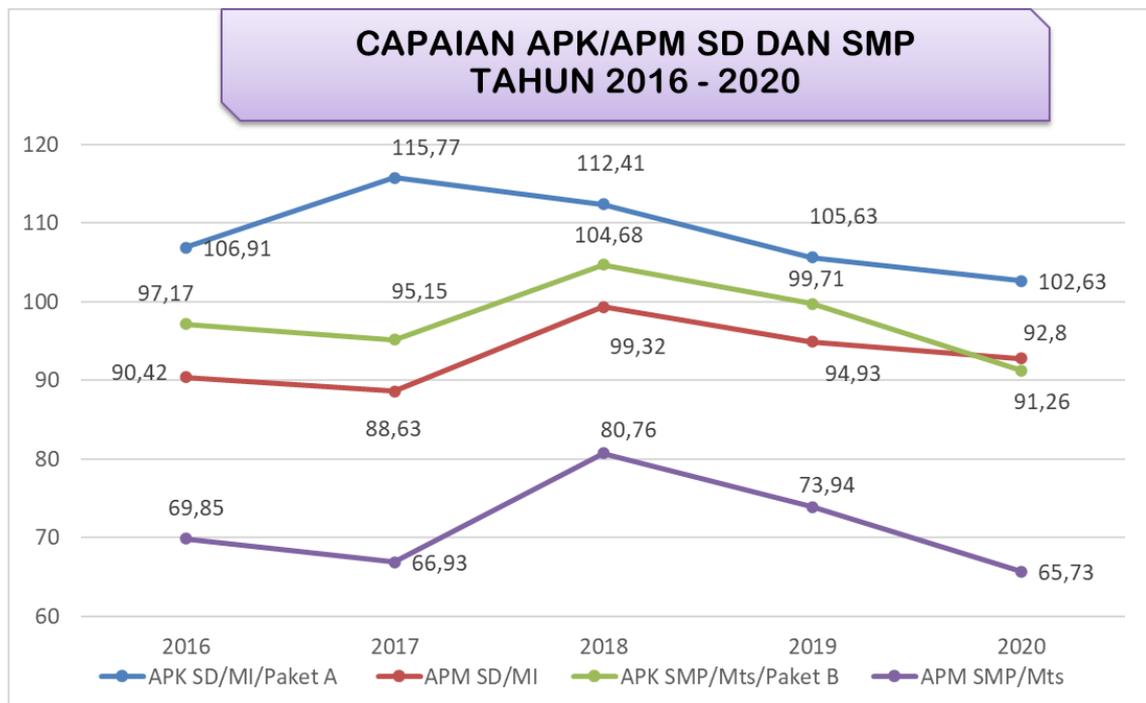
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS1.2) diatas, di jabarkan dalam Indikator Program yaitu bidang Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun



APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. **Kriteria:** Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah. **Kegunaan:** Untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase **Kriteria:** Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya 100%. **Kegunaan:** Untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai

APK/APM SD dan SMP realisasinya pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut :



Indikator Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan, Untuk dapat melihat kepastian memperoleh layanan pendidikan maka digunakan empat ukuran, yaitu :

- seberapa banyak siswa sudah dilayani melalui APK/APM (Angka Partisipasi Kasar/ Angka Partisipasi Murni);
- sejauh mana akses masuk sekolah melalui AM (Angka Melanjutkan) siswa yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- sejauh mana siswa dapat bertahan di sekolah melalu AB5/AB; dan
- sejauh mana siswa dapat lulus dengan tepat waktu melalui RLB.

Berdasarkan Grafik diatas APM dan APK. sampai dengan tahun 2020,

- ✚ APK SD/MI/Paket A sebesar 102,63%, dan APM SD/MI sebesar 92,80%;
- ✚ APK SMP/MTs/Paket B sebesar 92,80% dan APM SMP/MtS sebesar 65,73%;
- ✚ Disemua Jenjang belum mendekati 100%.

SASARAN STRATEGIS	IKSS/ IKP	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TAHUN 2020			TARGET AKHIR RENSTRA (2021)
				Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	IKP1.2.1	APK SD/MI/Paket A	105,63	117,7	102,63	87,20	117,71
	IKP1.2.2	APM SD/MI	94,93	99,06	92,80	93,68	97,66
	IKP1.2.3	APK SMP/MTs/Paket B	99,71	99,00	91,26	92,18	89,45
	IKP1.2.4	APM SMP/MTs	73,94	73,72	65,73	89,16	70,2

APK SD/MI/Paket A Realisasi capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan. ditargetkan mencapai 117,70% di tahun 2020. namun dari target tersebut baru terealisasi sebesar 102,63%, ada penurunan 3.00 poin dari tahun 2019. persentase capaian sudah 87,20%.

Begitu juga Angka partisipasi murni (APM) belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020 APM SD/MI ditarget sebesar 99.06%, dari target tersebut terealisasi sebesar 92,80%, dengan capaian 93,68% ada penurunan 2.13 poin dari realisasi 2019.

APK SMP/MTs/Paket B Realisasi capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan. ditargetkan mencapai 99,00% di tahun 2020. namun dari target tersebut baru terealisasi sebesar 91,26%, ada penurunan 8.45 poin dari tahun 2019. persentase capaian sudah 92,18%.

Begitu juga Angka partisipasi murni (APM) belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020 APM SMP/MTs ditarget sebesar 73,72%, dari target tersebut terealisasi sebesar 65,73%, dengan capaian 89,16% ada penurunan 8.21 poin dari realisasi 2019.

Terjadinya penurunan APK pada jenjang SD/SMP tidak menunjukkan kinerja yang rendah. Akan tetapi justru sebaliknya, penurunan tersebut menunjukkan bahwa pada jenjang SD lebih banyak dihuni anak usia 7–12 tahun dan JEnjang SMP lebih banyak dihuni anak usia 13 – 15 Tahun. Hal ini sesuai dengan Permendikbud No 44 tersebut berisi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021. Ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10 Desember 2019.

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 berisi 44 pasal yang mengatur tentang Ketentuan PPDB mulai dari persyaratan, jalur pendaftaran pelaksanaan PPDB (Pendaftaran, Seleksi, dan Pengumuman). Selain itu juga mengatur tentang Pendataan ulang, Perpindahan peserta didik, Pelaporan dan pengawasan, hingga Sanksi.

Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Dalam konteks ini, anak usia 7 tahun diwajibkan diterima terlebih dahulu sebagai peserta didik SD.

Program bantuan yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah jenjang SD dan SMP melalui DAK fisik dan nonfisik pada tahun 2020 di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SD dan SMP;
2. Pemberian BOS untuk siswa SD dan SMP;
3. Pembangunan Prasarana Pendidikan jenjang SD dan SMP;
4. Rehabilitasi/Renovasi Prasarana Pendidikan jenjang SD dan SMP; dan
5. Pengadaan Sarana Pendidikan jenjang SD dan SMP.

Tantangan yang terjadi adalah adanya penurunan persentase angka partisipasi baik APK dan APM jenjang SD dibandingkan tahun 2019. Penurunan tersebut tampak pada penurunan jumlah siswa jenjang SD dan sederajat secara keseluruhan dari 38.604 siswa di tahun 2019 menjadi 38.255 siswa di tahun 2020 atau 0.9% penurunannya.

Permasalahan dalam peningkatan angka partisipasi antara lain

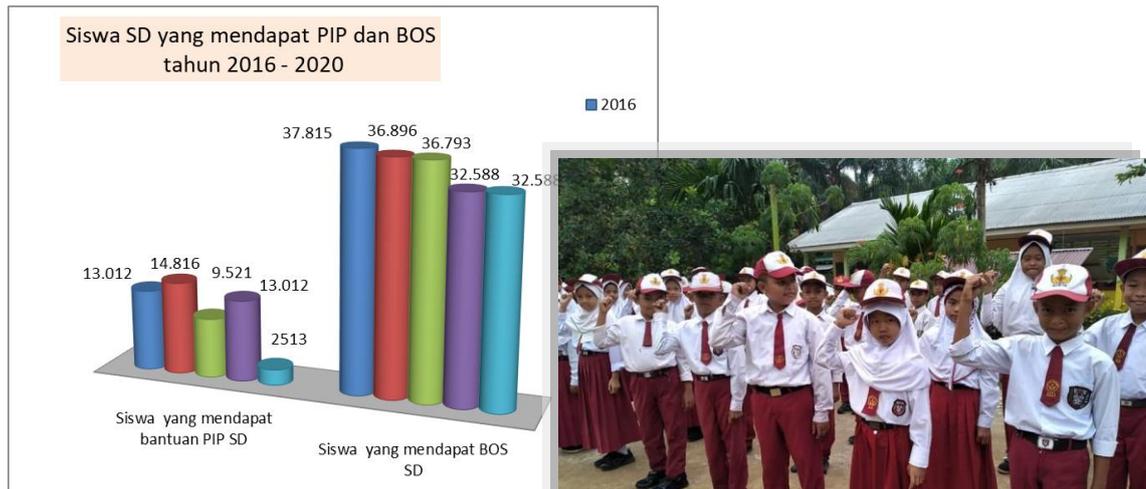
1. tren sosial terhadap pilihan sekolah oleh orang tua/wali siswa yang cenderung memilih masuk ke Madrasah dan Pondok Pesantren;
2. implementasi PP Nomor 2/2018 dan Permendikbud Nomor 32/2018 mengenai pelaksanaan SPM guna menarik anak-anak yang belum bersekolah untuk bersekolah belum optimal;
3. tingkat kesejahteraan sosial siswa yang rendah masih menjadi kendala bagi penduduk usia sekolah untuk dapat bersekolah; dan
4. akses ketersediaan akomodasi sekolah di daerah-daerah tertentu belum mencukupi atau radius jarak tempat tinggal dan sekolah yang masih cukup jauh.

Rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain

1. meningkatkan mutu dan sosialisasi sekolah umum, khususnya sekolah negeri;
2. mengimplementasikan PP No. 2/2018 dan Permendikbud No. 32/2018 mengenai Penarikan Anak Indonesia Usia Sekolah yang tidak bersekolah untuk kembali ke sekolah;
3. meningkatkan ketepatan sasaran dan penggunaan BOS dan PIP; dan
4. pembangunan dan perbaikan prasarana pendidikan seperti program RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, serta pengadaan sarana pendidikan lainnya.

Daftar Rekap Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dari Tahun Anggaran 2016 s.d 2021									
Sub Bidang Sekolah Dasar (SD)									
No	Jenis Kegiatan	Satuan	Jumlah Tahun						Jumlah Total s.d 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	ruang	-	12	42	13	13	27	107
2	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan Sedang/Berat beserta perabotnya	ruang	-	-	-	-	8	-	8
3	Rehabilitasi Ruang Guru dengan tingkat kerusakan Sedang/Berat beserta perabotnya	ruang	-	-	-	-	9	-	9
4	Rehabilitasi Jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta sanitasinya	ruang	-	-	-	4	50	-	54
5	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya	ruang	3	1	15	5	11	-	35
6	Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya	ruang	-	-	-	3	5	5	13
7	Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya	ruang	-	-	-	-	5	6	11
8	Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	ruang	-	-	-	-	3	4	7
9	Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya	ruang	-	-	-	-	1	7	8
10	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta perabotnya	ruang	-	-	-	-	-	5	5
11	Pengadaan Alat Peraga Matematika	set	12	-	-	-	-	-	12
12	Pengadaan Media Pendidikan	paket	2	-	-	-	-	19	21
13	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidik)	paket	3	36	12	-	28	-	79
14	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)	paket	-	-	-	-	-	10	10
15	Pengadaan Peralatan PJOK	paket	-	-	-	3	20	-	23
16	Pengadaan Peralatan Seni Budaya	paket	-	-	-	-	27	-	27
17	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	paket	-	-	-	2	11	-	13
Sumber : Operator Krisna/SIMDAK									

Berikut Diagram siswa yang mendapatkan PIP dan BOS tahun 2016-2019 :



Pada tahun 2020 telah disalurkan bantuan melalui PIP (Program Indonesia Pintar) kepada 2.513 siswa SD, menurun dari tahun 2019 yaitu sebanyak 13,012 siswa. Persentase Penurunan sangat signifikan.

Untuk siswa penerima Dana BOS SD masih sama dengan tahun 2019, yaitu sebanyak 32.588 siswa. Selain BOS untuk siswa ada juga BOS Kinerja dan BOS Afirmasi. Syarat dapat BOS Afirmasi dan BOS Kinerja difokuskan untuk sekolah yang paling membutuhkan dan terdampak pandemi Covid-19. Adapun ketentuannya untuk: Sekolah negeri dan swasta (SD, SMP, SMA, SMK, SLB) yang paling membutuhkan.

Dana bantuan sebesar Rp 60 juta per sekolah per tahun. Dana disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah. "Dana bantuan ini akan menyasar kepada 56.115 sekolah yang ada di 33.321 desa atau kelurahan di sejumlah daerah terdampak Covid-19," ujar Mendikbud Nadiem Makarim seperti dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud, Jumat (19/6/2020). Untuk Kegunaannya sama seperti BOS reguler, yakni untuk membayar guru honorer, tenaga pendidik, protokol kesehatan, dan internet.

Langkah antisipasi yang perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan APK/APM antara lain:

1. Menambah dan memperbaiki akses pendidikan terutama di Kecamatan-Kecamatan akses pendidikan masih sulit;
2. Memberikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, dan usaha-usaha yang terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung barat

3. Meningkatkan efektifitas pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan ketepatan pemberian Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh untuk mendorong anak-anak usia sekolah yang termarginalkan agar bersekolah kembali. Program pemberian kartu Indonesia Pintar juga diberikan kepada anak yatim piatu.
4. Pengawasan terhadap penerima KIP oleh pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap peserta didik dari keluarga miskin memperoleh manfaat dari PIP. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penyaluran dana PIP.

Sama seperti jenjang SD, pemenuhan akses jenjang SMP juga merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, Kemendikbud tetap memberikan bantuan untuk pemenuhan akses pendidikan pendidikan dasar khususnya jenjang SMP.

Program Kemendikbud untuk meningkatkan angka partisipasi pada jenjang SMP diantaranya :

1. Program Indonesia Pintar (PIP);
2. Pemberian BOS;
3. Pembangunan Prasarana Pendidikan;
4. Rehabilitasi/Renovasi Prasarana Pendidikan; dan
5. Pengadaan Sarana Pendidikan.

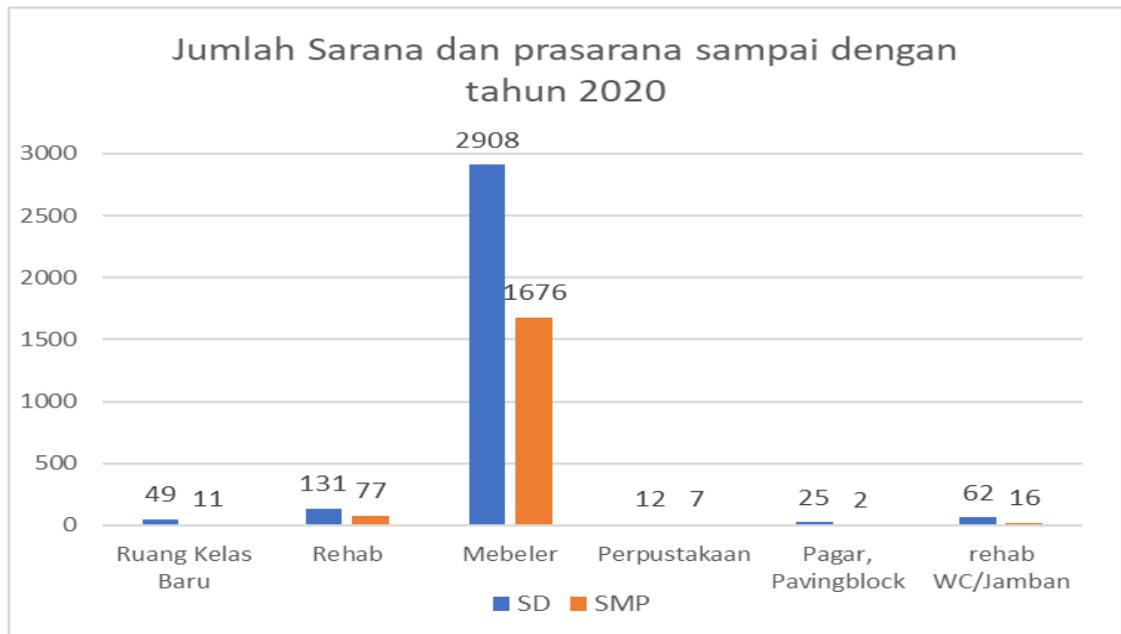
Terdapat korelasi positif antara anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berikut tabel Sarana dan Prasarana yang telah dibangun dalam Tahun 2016 - 2020;



BANTUAN DAK SMP TAHUN 2016 - 2021

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Jumlah Pertahun						Jumlah Total s.d 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	ruang	-	-	11	3	24	26	64
2	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya	ruang	-	-	-	1	7	-	8
3	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer beserta perabotnya	ruang	-	-	-	-	3	-	3
4	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	ruang	-	-	-	2	4	-	6
5	Rehabilitasi Ruang Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	ruang	-	-	-	2	4	-	6
6	Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta atau tanpa sanitasinya	ruang	-	-	-	4	4	-	8
7	Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya	ruang	-	2	-	-	-	-	2
8	Pembangunan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya	ruang	-	-	-	-	6	-	6
9	Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya	ruang	-	-	-	-	4	-	4
10	Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya	ruang	-	-	-	2	4	1	7
11	Pembangunan Laboratorium Komputer beserta perabotnya	ruang	-	-	-	-	3	1	4
12	Pembangunan Ruang Tata Usaha beserta perabotnya	ruang	-	-	-	-	-	1	1
13	Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya	ruang	-	-	-	-	-	1	1
14	Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika	paket	-	-	-	-	4	7	11
15	Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi	paket	-	-	-	-	4	7	11
16	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)	paket	-	-	-	2	2	2	6
17	Pengadaan Alat Peraga Matematika	paket	-	-	-	-	7	-	7
18	Pengadaan Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	paket	-	-	-	-	9	-	9
19	Pengadaan Media Pendidikan	paket	-	-	-	5	5	3	13
20	Pengadaan Peralatan PJOK	paket	-	-	-	4	7	-	11
21	Pengadaan Sarana Seni Budaya	paket	-	-	-	-	4	-	4
22	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah	paket	-	-	-	-	7	-	7
23	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	paket	-	-	-	1	2	-	3

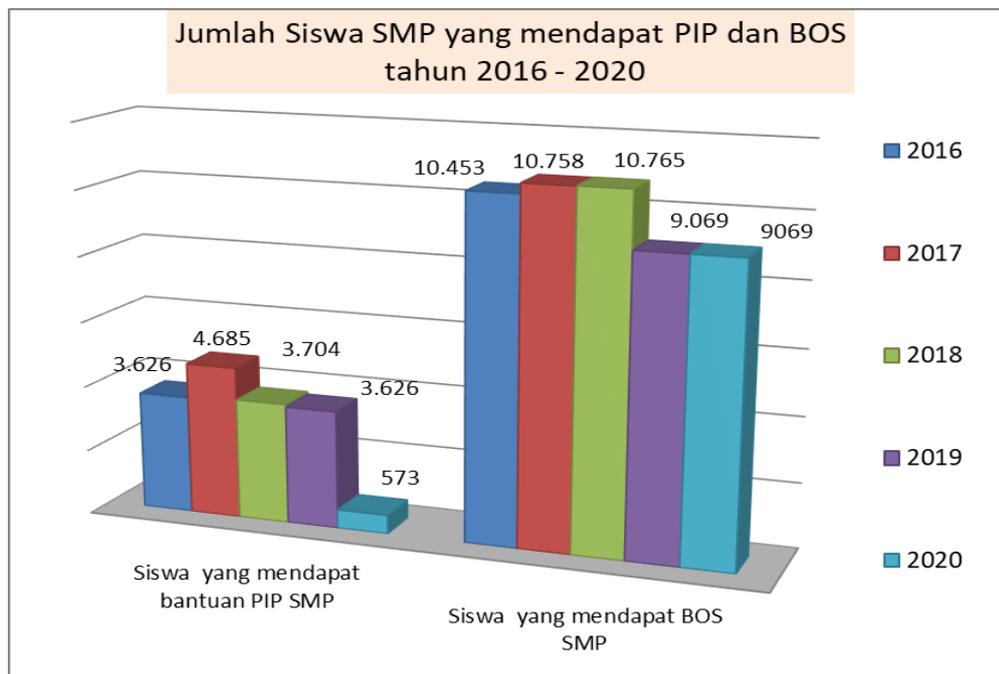


Realisasi sampai dengan tahun 2020 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD sebanyak 49 Ruang, SMP sebanyak 11 Ruang, Rehabilitasi Ruang Kelas SD sebanyak 131 Ruang, SMP 77 Ruang, Pengadaan Mebeler SD ada 2908 Set, SMP sebanyak 1676 set. Pembangunan perpustakaan ada SD ada 12 Ruang, SMP 7 Ruang, rehab jamban/WC SD sebanyak 62 Ruang, SMP 16 Ruang.

Pada tahun 2020 telah disalurkan bantuan melalui PIP (Program Indonesia Pintar) kepada 573 siswa SMP, menurun dari tahun 2019 yaitu sebanyak 3.626 siswa SMP.



Berikut diagram siswa SMP yang mendapatkan bantuan PIP dan BOS dari tahun 2016 sampai dengan 2020,



Langkah antisipasi yang perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan APK/APM SMP antara lain:

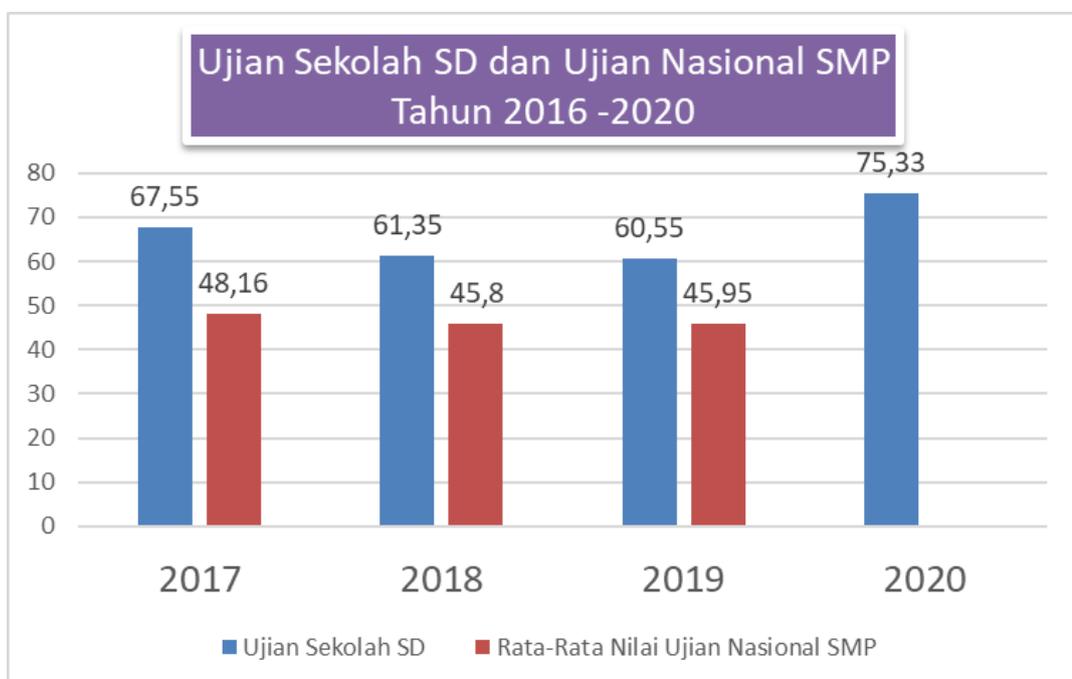
- a. Menambah dan memperbaiki akses pendidikan terutama di kecamatan -kecamatan yang akses pendidikan masih sulit
- b. Meningkatkan efektifitas pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan ketepatan pemberian Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu langkah ditempuh untuk mendorong anak-anak usia sekolah yang termarjinalkan agar bersekolah kembali. Program pemberian kartu Indonesia Pintar juga diberikan kepada anak yatim piatu.

SS 2. Meningkatnya Akses Mutu Layanan dan Lulusan Pendidikan Dasar

Sampai dengan tahun 2021 Mutu layanan pendidikan dasar menunjukkan peningkatan. Peningkatan tersebut terlihat dengan makin banyaknya satuan pendidikan dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang memperoleh akreditasi dan makin banyak sekolah pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selain mutu layanan yang meningkat, mutu lulusan pendidikan Dasar dan menengah juga menunjukkan peningkatan Rata-rata pencapaian pemenuhan delapan standar untuk jenjang SD. Berdasarkan data, rata-rata nilai delapan standar untuk satuan pendidikan yang reakreditasi jauh lebih baik dari sasaran baru. Diantara delapan standar yang diukur, standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dan standar sarana dan prasarana merupakan dua standar yang memiliki rata-rata skor masih rendah .

**Diagram Rata – rata Nilai Ujian Sekolah SD dan Ujian Nasional SMP
dari tahun 2016 - 2020**



3. IKSS 2.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI



Tahun 2019/2020 Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dibatalkan dan diganti dengan Ujian Sekolah (US) melalui surat edaran Mendikbud nomor 4 Tahun 2020 tentang kebijakan Pendidikan dalam masa Darurat Penyebaran Covid-19. Pelaksanaan Ujian Sekolah pada tahun pelajaran 2019/2020 ini ada penambahan 2 sekolah yaitu SD swasta BKMT an -Nisa dan SD Swasta Fathul Ulum sehingga ada 216 SD sesuai daftarNominasi tetap (DNT) sebanyak 5815 orang dengan persentase kelulusan 99,36%.

SASARAN STRATEGIS	IKSS/IKP	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TAHUN 2020			TARGET AKHIR RENSTRA (2021)
				Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Mutu Layanan dan Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah	IKSS2.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,20	100	99,36	99,36%	100%

IKP 2.1.1 Rata – Rata Nilai Ujian Sekolah SD

Penentuan kelulusan pada jenjang SD berdasarkan rata-rata nilai rapor sebelas semester dan dapat ditambah dengan nilai tugas forto folio dan Ujian tengah semester 12 untuk seluruh mata pelajaran yang ada pada struktur kurikulum SD.

Jika dilihat dari perolehan nilai pada Ujian Sekolah tahun pelajaran 2019/2020 maka rata-rata nilai relative meningkat yaitu 75.41 poin. Dan nilai tertinggi berada dikecamatan Tebing Tinggi dengan rata-rata 78.18 Poin dan yang terendah di kecamatan Senyerang dengan nilai Rata-rata 72.64 poin

Namun tidak ada salahnya tetap ditampilkan juga tren nilai rata permata pelajaran pada USBN tahun 2017-2019 Pada tabel berikut :

REKAP NILAI RATA-RATA USBN SD						
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT						
NO	TAHUN	MATA PELAJARAN			TOTAL	RATA - RATA
		B.INDONESIA	MATEMATIKA	IPA		
1	2017	68,27	66,4	67,97	202,64	67,55
2	2018	63,64	55,48	64,92	184,04	61,35
3	2019	62,82	58,78	60,06	181,66	60,55

Ada tiga mata pelajaran yang diujikan dalam ujian sekolah Berstandar Nasional (USBN) jenjang SD sederajat yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Porsi penyusunan soal ketiga mata Pelajaran Sebanyak 70 sampai dengan 80% soal USBN jenjang SD disiapkan oleh guru mata pelajaran pada satuan pendidikan yang kemudian dikonsolidasikan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) sisanya disiapkan oleh pusat. Mata pelajaran yang diujikan dalam USBN tetap tiga mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia, IPA dan Matematika, dengan porsi 90% soal berjenis pilihan ganda dan 10% berbentuk esai. Sedangkan untuk ujian sekolah (US), 100% soal disiapkan guru di sekolah masing- masing berdasarkan kisi-kisi nasional yang disiapkan oleh pusat.

Ada lima mata pelajaran yang diujikan dalam US yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Seni Budaya dan keterampilan, dan Penjaskes dan Olahraga. Kemendikbud mendorong guru-guru untuk membuat soal US dengan kombinasi pilihan ganda dan uraian.

Dengan pelaksanaan USBN, Kemendikbud mengembalikan peran guru dalam evaluasi belajar pada satuan pendidikan. Dengan USBN juga diharapkan akan meningkatkan kompetensi guru dan capaian kompetensi lulusan.

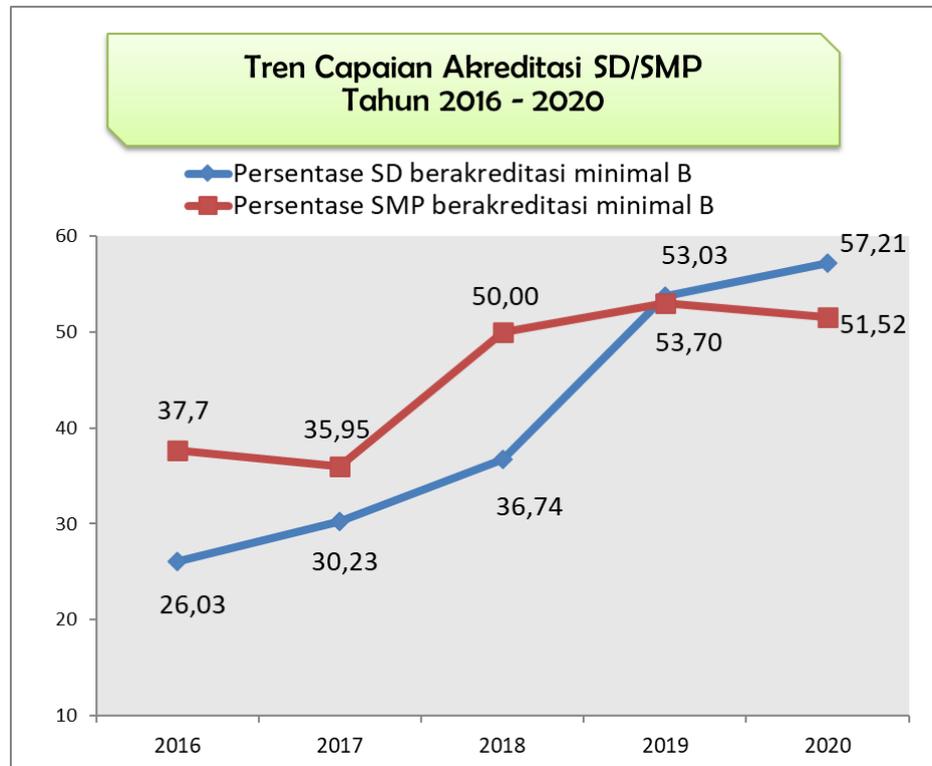
Faktor utama yang menyebabkan nilai rata-rata USBN mengalami koreksi tahun sebelumnya adalah penerapan soal *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) terutama untuk mata pelajaran matematika.

USBN tingkat SD memang tidak dijadikan sebagai standar kelulusan. Namun untuk tahun ini, hasil ujian tetap akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan penerimaan peserta didik baru selain ketentuan zonasi berdasarkan jarak. Selain digunakan sebagai bahan pertimbangan masuk ke jenjang selanjutnya, hasil USBN juga digunakan Kemendikbud untuk pemetaan kualitas mutu pendidikan sekolah dalam rangka peningkatan kualitas.

IKP 2.1.2

Persentase SD berakreditasi Minimal B

Realisasi Capaian Akreditasi tahun 2016 – 2020 jenjang SD dan SMP :



Realisasi Capaian Akreditasi SD minimal B terus mengalami kenaikan meskipun target kerja akhir RPJMD belum tercapai yaitu 60 % artinya masih ada sekitar 2,79% lagi yang harus diselesaikan.

Realisasi Capaian Akreditasi SMP minimal B tahun 2016 – 2020 mengalami penurunan pada tahun 2017 dan tahun 2020 ini, 2017 persentase 35,95%. Realisasi tahun 2020 yaitu 51,52%. ini sangat jauh dari target RPJMD yaitu sebesar 70%, masih ada 18,48% yang harus diselesaikan.

Jumlah SD dan SMP yang terakreditasi minimal B dapat dilihat pada Tabel berikut :

JUMLAH SEKOLAH AKREDITASI TAHUN 2020										
JENJANG SEKOLAH	JUMLAH LEMBAGA	AKREDITASI								BELUM DIAKREDITASI
		A	%	B	%	C	%	TT	%	
SD	215	10	4,65%	113	52,56%	92	42,79%	0	0,00%	
SMP	66	11	16,67%	23	34,85%	29	43,94%	2	3,03%	
Jumlah	281	21	21,32%	136	87,41%	121	86,73%	2	3,03%	0

Sumber ; UPA Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Capaian Akreditasi SD pada tahun 2020 sebesar 57,21% berarti baru 123 SD yang akreditasinya A/B dari 215 SD se kabupaten Tanjung Jabung Barat masih ada 92 SD yang belum mencapai akreditasi minimal B.

Sedangkan Capaian Akreditasi SMP pada tahun 2020 ini sebesar 51,52% berarti baru 34 SMP yang akreditasinya A/B dari 66 SMP se kabupaten Tanjung Jabung Barat masih ada 32 SMP yang belum mencapai akreditasi minimal B.

SASARAN STRATEGIS	IKSS/ IKP	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TAHUN 2020		
				Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Mutu Layanan dan Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah	IKP2.1.2	Persentase SD berakreditasi minimal B	53,70	43,67	57,21	131%

Dalam penilaian akreditasi ada delapan standar, yaitu :

1. Standar isi;
2. Standar Proses;
3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Standar Sarana dan Prasarana (SarPras);
6. Standar Pengelolaan;
7. Standar Pembiayaan; dan
8. Standar Penilaian.



Diantara delapan standar yang diukur, Standar Isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dan standar sarana dan prasarana, merupakan tiga standar yang memiliki rata-rata skor masih rendah.

Berdasarkan Rekomendasi BAP Propinsi hasil akreditasi, hal-hal yang menyebabkan nilai standar isi masih rendah antara lain :

- a. Hampir semua sekolah yang diakreditasi tidak punya dokumen satu; dan
- b. dokumen RPP dan Silabus tidak diperbaharui.

Nilai standar pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah, antara lain :

- a. Guru mata pelajaran (Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani, Olahraga Kesehatan, Muatan Lokal, dan lain-lain) mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan;
- b. Masih terdapat Guru yang belum S1;
- c. Keterbatasan tenaga Pustakawan; dan
- d. Keterbatasan tenaga administrasi.

Sedangkan penyebab nilai standar sarana dan prasarana masih rendah antara lain:

- a. keterbatasan daya listrik dan Signal;
- b. keterbatasan luas lantai bangunan;
- c. kekurangan prasarana yang lengkap dengan kondisi baik;
- d. kekurangan tempat parkir sesuai ketentuan;
- e. Kekurangan WC Jamban yang bersih dan sehat;
- f. Kekurangan sumber Air bersih; dan
- g. Hampir semua sekolah tidak mempunyai Ruang UKS, ataupun Ruangan penunjang lainnya.

Pemerintah Pusat dan Daerah berupaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah baik melalui bantuan pendanaan maupun peningkatan pengelolaan satuan pendidikan, Untuk meningkatkan jumlah sekolah SD yang berakreditasi minimal B, sampai tahun 2019 bantuan berupa (lihat tabel).

Hambatan/kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan proses akreditasi sekolah adalah sebagai berikut.

1. Pemahaman penjaminan mutu melalui akreditasi khususnya untuk jenjang SD dan SMP yang masih kurang. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian satuan pendidikan yang tidak bersedia atau enggan mengisi data isian akreditasi (DIA) sebagai syarat awal untuk dilakukan akreditasi.
2. Akses terhadap Sispena mengalami kendala di banyak satuan pendidikan di daerah terpencil akibat jaringan internet, sarana, dan sumber daya yang terbatas
3. Kurang tepat sasaran satuan Pendidikan mana saja yang selayaknya menjadi sasaran oleh Kemendikbud untuk didahului dilakukan Akreditasi sehingga mengakibatkan perubahan data sasaran pada saat proses akreditasi berlangsung.
4. Asesor masih kurang sehingga berakibat pada distribusi penugasan asesor yang tidak merata.

Solusi dan langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. melakukan sosialisasi akreditasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan secara berkelanjutan agar masyarakat dan pihak-pihak terkait mengetahui manfaat akreditasi sebagai bagian penting dalam proses penjaminan mutu pendidikan;
2. melakukan penguatan implementasi Sispena secara optimal, baik perangkat keras, perangkat lunak maupun penguatan sumber daya manusia;
3. melakukan koordinasi terkait pendataan satuan pendidikan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
4. Untuk pelaksanaan akreditasi di daerah yang tidak terjangkau jaringan internet perlu mempertimbangkan mekanisme akreditasi melalui penugasan asesor lintas Kabupaten atau kebijakan khusus lainnya; dan
5. melakukan penguatan kapasitas asesor khususnya dalam penyusunan rekomendasi yang lebih operasional sehingga dapat menjadi acuan dalam intervensi kebijakan oleh pihak-pihak terkait.

4. IKSS 2.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Tahun 2019/2020 Ujian Nasional (UN) dibatalkan dan diganti dengan Ujian Sekolah (US) melalui surat edaran Mendikbud nomor 4 Tahun 2020 tentang kebijakan Pendidikan dalam masa Darurat Penyebaran Covid-19. Pelaksanaan Ujian Sekolah pada tahun pelajaran 2019/2020 ini ada dilaksanakan oleh 66 SMP daftar Nominasi tetap (DNT) sebanyak 3306 orang dan yang lulus sebanyak 3257 Orang dengan persentase kelulusan 99,52%. Terdapat 49 dianggap tidak lulus dikarenakan ada 46 Orang mengundurkan diri dan 3 Orang meninggal.

SASARAN STRATEGIS	IKSS/IKP	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TAHUN 2020			TARGET AKHIR RENSTRA (2021)
				Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Mutu Layanan dan Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah	IKSS2.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,96	99,89	98,52	99%	100%



IKP 2.2.1

Rata – Rata Nilai Ujian Nasional SMP

Tahun 2020 Ujian Nasional tingkat SMP telah dihapuskan.

SASARAN STRATEGIS	IKSS/ IKP	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2018 (%)	TAHUN 2019			TARGET AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN 2019 TERHADAP AKHIR RENSTRA
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian		
2. Meningkatkan Mutu Layanan dan Lulusan Pendidikan Dasar dan	IKP2.2.1	Rata-Rata Nilai Ujian Nasional SMP	45,80	50,00	45,95	92%	55,00	84%

Capaian Rata-rata nilai UN SMP untuk tahun 2019 mencapai 45,95 sedangkan pada tahun tersebut ditargetkan sebesar 50. Rata-rata nilai UN tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 0,15 poin. Tercatat nilai UN jenjang SMP untuk tahun 2018 sebesar 45,80. Walaupun belum mencapai Target tetapi mengalami peningkatan ditahun sebelumnya.

Selain mengalami koreksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2020 maka capaian tahun 2019 tersebut masih memiliki selisih sebesar 9,05 poin. Tercatat rata-rata UN SMP/SMPLB pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 55.00

Untuk tahun 2019 Sekolah pelaksana UNBK sebanyak 66 SMP, berarti seluruh sekolah yang ada di kabupaten Tanjung Jabung Barat ini telah melaksanakan UNBK walaupun memang dengan kondisi yang seadanya.

HASIL UN SMP PER-MATAPELAJARAN TAHUN 2019

NO	TAHUN	SATUAN PENDIDIKAN	MATA PELAJARAN				TOTAL	RATA - RATA
			B.INDONESIA	MATEMATIKA	IPA	B.INGGRIS		
3	2019	SMP	59,82	39,39	42,38	42,2	183,79	45,95

Tabel diatas adalah capaian di Tahun 2016 – 2019, untuk Tahun 2020 Ujian Nasional ditiadakan dan kelulusan telah ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi sehingga target kinerja belum tercapai antara lain:

1. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadikan ujian nasional bukan sebagai penentu kelulusan menyebabkan rendahnya motivasi siswa untuk memperoleh nilai yang lebih baik;
2. Pada pelaksanaan ujian nasional tahun 2019 persentase soal yang sulit dinaikkan dari 5% menjadi 10%.
3. Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara Ujian Nasional yang membuat kategori soal dengan High Order Thinking Skill (HOTS).
4. Ketidaksiapan peserta didik untuk menjawab soal-soal yang mengukur level berfikir lebih tinggi.
5. Keseriusan dan motivasi siswa terutama di jenjang SMP menghadapi UN menurun. karena konsekuensi UN terhadap nilai ijazah sudah tidak ada lagi. Selain itu kegunaan UN untuk seleksi juga menjadi kecil perannya dengan adanya kebijakan zonasi pada penerimaan siswa baru.

Langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Sosialisasi secara maksimal aplikasi Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia sekolah yang dapat digunakan sebagai latihan bagi siswa untuk menjawab soal-soal yang mengukur level berpikir lebih tinggi.
2. Melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam pemanfaatan hasil UN untuk peningkatan kompetensi pedagogik guru dan kompetensi pembuatan soal Higher Order Thinking Skills (HOTS).

Berdasarkan fenomena tersebut diperlukan peran aktif guru, Kepala Sekolah dan para pemangku kepentingan untuk lebih memotivasi siswa untuk meningkatkan kualitas belajarnya. Selain itu diperlukan adanya peningkatan soal sulit dalam penyusunan soal try out sehingga bisa memberikan gambaran kepada siswa tentang tingkat kesulitan soal pada saat ujian nasional

IKP 2.2.2

Persentase SMP berakreditasi Minimal B

SASARAN STRATEGIS	IKSS/ IKP	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TAHUN 2020			TARGET AKHIR RENSTRA (2021)
				Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Mutu Layanan dan Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah	IKP2.2.2	Persentase SMP berakreditasi minimal B	53,03	51,67	51,52	100%	70,00

Realisasi Capaian Akreditasi SMP pada tahun 2020 ini sebesar 51,52% belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 51,67%. Dari target renstra sebesar 70.00% masih ada 18,48% yang harus diselesaikan, berarti baru 34 SMP yang akreditasinya A/B dari 66 SMP se kabupaten Tanjung Jabung Barat masih ada 32 SMP yang belum mencapai akreditasi minimal B. Diantara delapan standar yang diukur, standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dan standar sarana dan prasarana, merupakan dua standar yang memiliki rata-rata skor masih rendah. masih banyak sekolah yang belum memiliki kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana sesuai SNP, sedangkan intervensi dan pembinaan yang diberikan belum dapat mencakup seluruh sekolah yang harus ditingkatkan mutunya.

Berdasarkan Rekomendasi BAP Propinsi hasil akreditasi, hal-hal yang penyebab nilai standar pendidik dan tenaga kependidikan rendah, antara lain :

- Kekurangan guru yang memiliki sertifikat pendidik;
- Kekurangan guru yang mengajar sesuai latar belakangnya;
- Kekurangan tenaga administrasi yang berkualifikasi akademik minimal SMA atau yang sederajat;
- Kurangnya tenaga perpustakaan memiliki kualifikasi minimal SMA atau yang sederajat dan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah;
- kurangnya tenaga tenaga laboran dengan kualifikasi akademik sesuai ketentuan standar tenaga laboratorium;
- Masih ada yang belum miliki Instalasi Listrik dengan daya yang mencukupi kebutuhan; dan
- Jamban/WC yang belum mencukupi.

Sedangkan penyebab nilai standar sarana dan prasarana rendah antara lain:

- a. Keterbatasan luas lahan sekolah;
- b. Keterbatasan luas lantai bangunan;
- c. Keterbatasan ruang perpustakaan;
- d. Keterbatasan ruang konseling; dan
- e. Keterbatasan daya listrik.

Untuk mendukung dan membantu ketercapaian indikator kinerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan beberapa bantuan yang ditujukan kepada sekolah agar sekolah SMP dapat memenuhi SNP.

Dalam pelaksanaan akreditasi baik tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah mengalami beberapa kendala, antara lain :

1. Akibat adanya covid-19 semula sekolah yang akan di akreditasi sebanyak 50 sekolah dibatalkan menjadi hanya empat sekolah saja;
2. Sasaran akreditasi belum sepenuhnya bisa menjangkau Kecamatan yang Jauh dari Kota sehingga Pada saat asesor melakukan visitasi ke sekolah/madrasah dan sosialisasi instrumen terkendala tidak hanya pada jaringan/akses internet, tetapi juga cuaca (musim) karena menggunakan transportasi laut;
3. Sistem penilaian akreditasi yang digunakan sudah berbasis *online*, sehingga untuk daerah-daerah tertentu yang belum ada jaringan internet harus ada kebijakan khusus dari BAN S/M; dan
4. Kuantitas asesor menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan akreditasi dikarenakan ketersediaan asesor per jenjang masih belum proporsional terhadap jumlah sekolah/madrasah. Disamping itu variasi latar belakang pekerjaan asesor masih harus di evaluasi, karena umumnya asesor sekarang adalah pengawas yang berada dalam lingkungan dinas pendidikan maupun kantor wilayah kementerian agama.

Untuk mengatasi kendala yang dialami tersebut telah diambil langkah-langkah antisipasi diantaranya:

1. Konfirmasi ke pihak BAN agar melalui pihak Dinas dulu sehingga Dinas bisa membina kesiapan sekolah;
2. Penyempurnaan SisPenA harus dilakukan untuk memudahkan para pengguna terutama sekolah/madrasah dan asesor;
3. Perangkat akreditasi terutama untuk standard pembiayaan memerlukan peninjauan ulang tentang item-item instrumen yang ada dalam standard pembiayaan; dan
4. Pembinaan dan Pendampingan Sekolah yang akan di Akreditasi



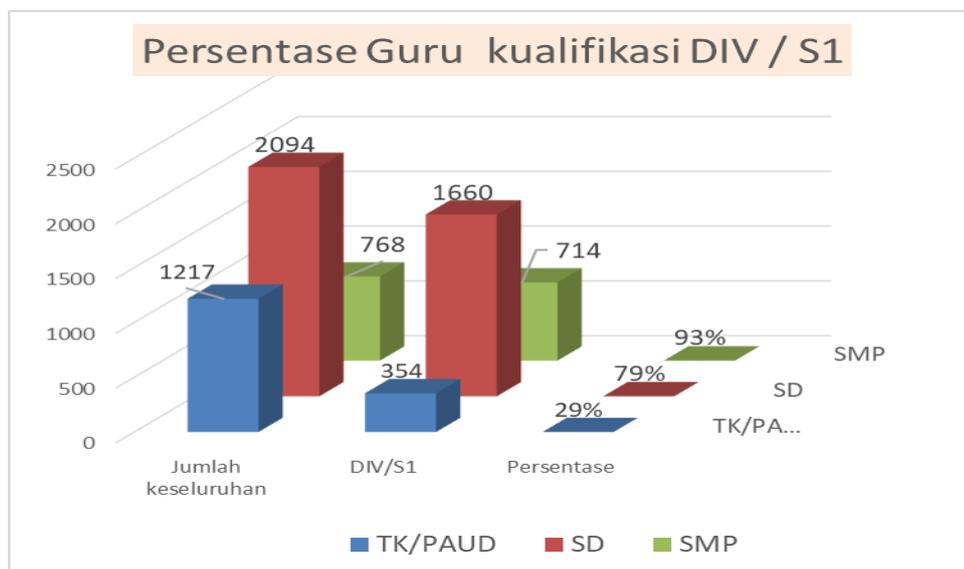
SS 3. Meningkatkan Profesionalisme dan Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan

Jumlah guru layak mengajar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada jenjang TK/PAUD sebesar 354 orang atau 29,00% sedangkan guru Layak di jenjang SD sebesar 1.660 orang atau 79,00%. Sedangkan di jenjang SMP sebanyak 714 Orang atau 93%.

Hal ini berarti masih terdapat Guru yang belum layak (belum memiliki Kualifikasi Pendidikan D-IV/S-I) pada setiap jenjang pendidikan sebagai berikut :

- ✚ TK/PAUD sebanyak 863 Orang atau 71 %
- ✚ SD sebanyak 434 Orang atau 21%
- ✚ SMP sebanyak 54 orang atau 7%.

Kondisi ini cukup memprihatinkan, untuk itu diperlukan upaya lebih lanjut dalam rangka penyetaraan guru agar sesuai dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan pada UU No. 14/2005. Jumlah guru menurut kelayakan mengajar dapat dilihat pada Tabel dan Grafik.



Profesionalisme guru diukur melalui sertifikat yang didapatkannya. Sampai dengan tahun 2020 sebanyak 1352 guru dan Tenaga Kependidikan Lainnya telah bersertifikat dari total 2419 orang Guru dan tenaga Kependidikan lainnya yang telah Kualifikasi >DIV/S1 atau 56 %. (PNS dan Non PNS). Dapat dilihat pada Grafik berikut :

GTK Sertifikasi Tahun 2021

No	Jenjang	Jumlah GTK/DIV /S1 Tahun 2021	Tahun						Persentase
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	TK		17	16	14	14	19		
2	SD		1037	1025	950	894	1022		
3	SMP		228	229	228	286	295		
4	PENGAWAS		32	25	21	19	15		

Sumber ; GTK dikbud, 2021

5 IKSS 3.1 Persentase Guru /Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lainnya Profesional (Kualifikasi dan Sertifikasi)

Realisasi capaiannya belum mencapai

SASARAN STRATEGIS	IKSS / IKP	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RENSTRA (2021
				Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatkan Profesionalisme dan distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	IKKS3.1	Persentase Guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya Profesional (Kualifikasi dan Sertifikasi)	75,80				100%

Realisasi capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan, dari target yang ditetapkan sebesar 99,23% baru terealisasi sebesar 75.80% atau sebanyak 1351 PTK yang telah sertifikasi dari jumlah PTK yang memenuhi syarat S.1/D4 sebanyak 2419 Orang. Atau masih terdapat PTK 1068 Orang atau 24,20% yang belum Sertifikasi

Target kinerja sebesar 99,23% tidak tercapai dikarenakan antara lain:

- a. Terjadinya perubahan pola sertifikasi menjadi Pendidikan Profesi Guru yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 66. Perubahan pola tersebut mengakibatkan Adanya perubahan pola kelulusan yang menyebabkan tingkat kelulusan program sertifikasi berkurang; dan
- b. Mulai Tahun 2018, sertifikasi bagi guru dalam jabatan menggunakan model Pendidikan Profesi Guru (PPG). Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 66 yang berbunyi “Bagi Guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi akademik S-I/D-IV tetapi belum memperoleh sertifikat pendidik dapat memperoleh sertifikat pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Upaya yang dilakukan Untuk mencapai target yang ditetapkan, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui sharing pembiayaan pendidikan sertifikasi guru dari beberapa pemerintah daerah. Berdasarkan PP No 19 tahun 2017 dan Surat Direktur Jendral Guru Tenaga Kependidikan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan dapat dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

Dalam upaya peningkatan GTK yang professional dilakukan tidak saja melalui memfasilitasi pemberian sertifikasi pendidik oleh pusat. Upaya lain yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dengan melakukan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan Diklat.

Melalui dana APBD Kegiatan pada Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- ✚ Diklat Calon Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP;
- ✚ Tes Calon Kepala Sekolah, TK, SD, SMP;
- ✚ Diklat Kepala Perpustakaan;
- ✚ Lomba Guru, Kepala TK, SD, SMP, serta Pengawas yang berprestasi dan berdedikasi serta pengiriman Pemenang untuk mengikuti lomba ditingkat Provinsi;
- ✚ Pelaksanaan, Pengelolaan Data dan Pembayaran Tunjangan GTT (Guru Tidak



- Tetap) pada Sekolah Negeri jenjang Pendidikan TK, SD, SMP;
- ✚ Pelaksanaan, Pengelolaan Data dan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru; dan
 - ✚ Pelaksanaan, Pengelolaan Data dan Pembayaran Aneka Tunjangan Guru (Tunjangan Insentif, Tunjangan Kualifikasi, Tunjangan Khusus dari Dana APBN).

SS. 4

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Budaya Masyarakat dan Pelaku Budaya Dalam Melindungi Budaya Daerah

7. IKSS 4.1 Persentase Lembaga Budaya yang memiliki Legalitas

Keberadaan lembaga seni budaya di daerah, sangat mendukung pengembangan dan pelestarian budaya lokal. Tugas dan fungsi lembaga seni budaya ini mengembangkan sumberdaya manusia yang potensial dalam bidang seni dan budaya



dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan pagelaran dan festival kesenian daerah dan tradisi sebagai upaya melestarikan budaya lokal.

Lembaga budaya adalah lembaga publik dalam suatu negara yang berperan dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, seni, lingkungan dan pendidikan pada masyarakat yang ada pada suatu daerah atau negara. Lembaga kebudayaan baik yang berbentuk lembaga

swadaya masyarakat (LSM), sanggar, atau paguyuban merupakan elemen lain yang dapat berperan serta dalam pelestarian seni dan budaya. Sejauh ini lembaga kebudayaan dipandang sebagai elemen masyarakat relatif memiliki perhatian dan kepedulian terhadap eksistensi dan kelangsungan seni dan budaya daerah. Dengan adanya lembaga seni budaya tersebut, diharapkan seni budaya daerah dan budaya nasional akan tetap dapat lestari dan berkembang.

Tahun 2021 legalitas Lembaga Budaya, meningkat sekitar 339% dari tahun 2019 yaitu sebanyak 227 lembaga Budaya dari 67 ditahun 2019. Lembaga Budaya 15 lembaga yang telah mempunyai legalitas terdiri dari 13 Lembaga Adat Melayu (LAM) berada di 13 Kecamatan dan 134 Kelurahan dan Desa, 3 Sanggar yaitu sanggar Anak Tungkal dan Sanggar Serase berada di kecamatan Tungkal Ilir, kesenian Hadrah Al Baqiat di kecamatan Senyerang, berarti bahwa seluruh Lembaga Adat Desa dan kelurahan dalam kabupaten sudah di SK kan dan dikukuhkan.

Grup Seni Budaya Tahun 2017 - 2021

31	66	67	227
			
2017	2018	2019	2020

Sumber ; Bidang Kebudayaan Dikbud

Berikut tabel lembaga Budaya tahun 2020 masing-masing kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Kecamatan	Jumlah Grup seni Budaya
1	BATANG ASAM	15
2	BETARA	23
3	BRAM ITAM	17
4	KUALA BETARA	12
5	MERLUNG	13
6	MUARA PAPALIK	13
7	PENGABUAN	16
8	RENAH MENDALUH	12
9	SEBERANGKOTA	11
10	SENYERANG	16
11	TEBING TINGGI	18
12	TUNGKAL ILIR	48
13	TUNGKAL ULU	13
T A H U N	2020	227
	2019	67
	2018	66
	2017	31



Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam Lambatnya Proses Legalitas Kelembagaan Budaya Di Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

1. Wabah Pandemi corona-19
2. Besarnya Biaya dalam Proses Legalitas
3. Admininstrasi yang panjang dan banyak sehingga seringkali pengurus lembaga budayanya/Komunitas kurang berminat mendaftarkan Status kelembagaannya
4. Kurangnya SDM Pegiat dan Peminat terhadap seni budaya tradisional karena tergerus arus globalisasi yang begitu pesat di dalam masyarakat
5. Karena Penadataan budaya dimulai tahun 2019 untuk pelaksanaan kegiatan belum dapat di alokasikan dengan maksimal

Solusi yang ada akan dan telah dilakukan antara lain :

1. Pendataan Ulang untuk seluruh kelompok Seni Budaya secara berkala;
2. Memberikan keringanan biaya dalam proses legalitas;
3. Mensederhanakan administrasi Legalitas pendirian kelompok Seni budaya;
4. Memberikan Pelatihan, Pembinaan dan PEngembangan Kelompok Seni Budaya;
5. Membuka formasi PNS yang memiliki Latar Belakang Pendidikan ilmu Budaya; dan
6. Adanya penambahan kegiatan yang dapat dan mampu meningkatkan pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.

8. IKSS 4.2 Jumlah Hasil karya Individu yang memiliki HaKI

Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HKI dalam dunia internasional dikenal dengan nama *Intellectual Property Rights (IPR)* yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia.

SASARAN STRATEGIS	IKSS/ IKP	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TAHUN 2020		
				Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Budaya dan pelaku budaya dalam melindungi budaya Daerah	IKSS4.2	Jumlah Hasil karya Individu yang memiliki HAKI	3 Karya	1 karya	0,00	0%

Realisasi capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan, dari target yang ditetapkan sebesar 1 Karya terealisasi tidak ada satupun karya yang telah diusulkan mendapatkan HaKI. Di tahun 2020 ini, kita sudah mengajukan 2 (dua) Karya Cipta dibidang Seni Tari, yaitu :

1. Tari Kelung Karya M.Saiful
2. Tari Merisek Karya M. Saiful

Beberapa event sudah dipromosikan, untuk legalitasnya sedang dalam Proses di Pusat melalui Disbudpar Provinsi Jambi.

Sedangkan Budaya yang sedang diajukan untuk mendapatkan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yaitu :

1. Tradisi Malam Mandi Penganten di Kuala Tungkal
2. Tradisi Haul Syekh Abdul Qodir Jailani
3. Tradisi Tari Barahoi (Batang Asam)
4. Tradisi Lesung Betingkah (Lubuk Kambing)
5. Tradisi Mandi Tujuh Bulan (semua kecamatan)
6. Tradisi Arakan Sahur (Kuala Tungkal)
7. Tradisi Arba' Mustamir (Tungkal Ilir)
8. Tradisi Membayar Fidhiyah Orang Meninggal
9. Makanan Mandai Tiwadak

10. Tradisi Makan Bahidang
11. Kue Bakak
12. Kue Batil
13. Kue Cengkodok
14. Kue Serabi
15. Kue Tutuli
16. Kue Gelang
17. Permainan Taji Durian
18. Jus Pinang Mude

Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam Lambatnya Proses Legalitas Kelembagaan Budaya Di Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

1. Proses dan kelengkapan administrasi pendaftaran HaKI/WBTB yang banyak;
2. Lamanya konfirmasi kelengkapan berkas pendaftaran HaKI/WBTB; dan
3. Besarnya biaya yang dikeluarkan dalam proses penetapan HaKI/WBTB.

Solusi yang ada akan dan telah dilakukan antara lain :

1. Memberikan keringanan biaya dalam proses legalitas; dan
2. Menyederhanakan administrasi legalitas.



IKSS 5.1 “Nilai AKIP”

SASARAM STRATEGIS	IKSS / IKP	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	TAHUN 2021		
				Target	Realisasi	Capaian

Bab III. Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	IKSS5.1	Nilai AKIP	70,00			
--	---------	------------	-------	--	--	--

Tabel diatas belum menampilkan nilai skor LAKIP untuk tahun 2021 karna memang belum dilakukan penilaian oleh tim Penilai.

Tahun 2020 realisasi capaiannya 70,00 menunjukkan kinerja positif walaupun belum mencapai target kinerja yang ditetapkan, dari target skor 70,00 nilai yang diperoleh 70,00 dengan persentase capaian kinerja sebesar 85%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1.50 poin. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2021 sebesar 75, Maka Perlu kerja keras dari seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar target nilai skor lakip 75 dapat tercapai di tahun 2021.

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , beberapa upaya yang dilaksanakan pada tahun 2020 antara lain :

1. Melakukan rewiuw atas indikator kinerja seluruh Bidang;
2. Pembinaan penerapan SAKIP pada seluruh Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
3. Menyusun laporan kinerja yang kualitas laporan kerjanya masih rendah.

Skor akuntabilitas kinerja merupakan penilaian terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah. Penilaian tersebut merupakan akumulasi dari 80% penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan 20% dari capaian kinerja. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja.

Hasil Penilaian AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020, dapat dilihat dari table berikut :

No	Komponen/Sub Komponen	BOBOT	SATUAN KERJA	
			Y	NILAI
A	Perencanaan Kinerja	30%	%	
B	Pengukuran Kinerja	25%	%	

C	Pelaporan Kinerja	15%	%	
D	Evaluasi Internal	10%	%	
E	Pencapaian Sasaran/Kinerja	20%	%	
	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)	100%	%	70,00

Daftar temuan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi system Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja tahun 2020 antara lain:

Uraian Ringkasan	Rekomendasi Tahun 2019 (Uraian Ringkasan)	
A. Perencanaan Kinerja	1	Agar Target Jangka Menengah dalam Renstra dimonitor dan hasilnya dapat dimanfaatkan
	2	Agar Dokumen renstra melampirkan hasil review berkala
	3	Agar Rencana Kerja Tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan Anggaran
	4	Agar dilakukan Monitoring Rencana Aksi Secara berkala
B. Pengukuran Kinerja	1	Agar pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi
	2	Agar IKU dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen Perencanaan dan penganggaran
	3	Agar IKU direview secara berkala
	4	Agar ditindaklanjuti Pengukuran Kinerja atas Rencana Aksi untuk pengendalian dan pemamfaatn Kinerja secara berkala
C. Pelaporan Kinerja	1	Agar Laporan Kinerja menyajikan Informasi tentang Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya
	2	Agar Laporan Kinerja menyajikan Informasi tentang keuangan yang terkait dengan pencapaian Sasaran Kinerja Instansi
	3	Agar dimasukkan informasi Kinerja dalam laporan Kinerja yang dapat diandalkan
	4	Agar Informasi yang disajikan dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan
	5	Agar Informasi yang disajikan sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
	6	Agar Informasi yang disajikan sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja
	7	Agar Informasi yang disajikan sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja
D. Evaluasi Internal	1	Agar Evaluasi Program sepenuhnya dilaksanakandalam rangka menilai keberhasilan program
	2	Agar Evaluasi Program sepenuhnya memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan
	3	Agar Evaluasi Program sepenuhnya memberikan rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan
	4	Agar Pemantaun Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka megendalikan Kinerja
	5	Agar Pemantaun Rencana Aksi memberikan alternatif pelatihan yang dapat dilaksanakan
	6	Agar hasil Evaluasi Rencana Aksi sepenuhnya menunjukkan perbaikan setiap periode
	7	Agar Evaluasi Program sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa mendatang
	8	Agar Hasil Evaluasi Rencana Aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata
E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	1	Agar Capaian Kinerja dapat ditingkatkan lebih baik dari tahun sebelumnya
	2	Agar Informasi mengenai kinerja dapat ditingkatkan dan diandalkan

Pengelompokkan Nilai Indeks Berdasarkan Permen PAN RB No. 14/2017

No.	Indeks (%)	Kategori	CSI	Interpretasi
1.	> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan Sekali	Istimewa
2.	> 80 - 90	A	Sangat Memuaskan	Sangat Baik
3.	> 70 - 80	BB	Memuaskan	Baik
4.	> 60 - 70	B	Cukup Memuaskan	Cukup Baik, perlu sedikit perbaikan
5.	> 50 - 60	CC	Kurang Memuaskan	Agak baik, perlu perbaikan yang tidak mendasar
6.	> 30 - 50	C	Tidak Memuaskan	Kurang, perlu banyak perbaikan dan perubahan yang mendasar
7.	> 0 - 30	C	Sangat Tidak Memuaskan	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang mendasar

Melihat kelemahan/permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan Tim APiP, antara lain:

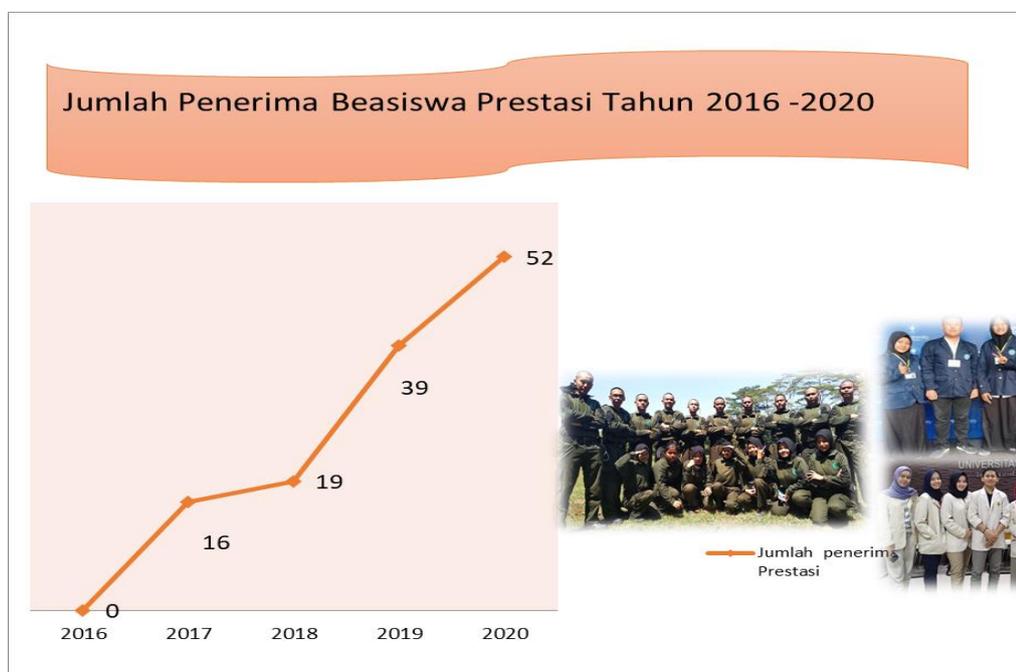
1. Membangun komitmen dari seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai dari pimpinan sampai dengan staf;
2. Menyelesaikan revaluasi aset dan meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan serta pengamanan aset tetap sehingga penyajian aset tetap memadai;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

SS 6

Meningkatkan Ratio Tingkat kelulusan SDM masyarakat

10. IKSS 6.1 “Jumlah Penerima Beasiswa Prestasi”

Tren Capaian penerima Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini



Realisasi capaian kinerjanya tahun 2020 melampaui target yang ditetapkan. Mahasiswa ditargetkan sebanyak 38 Orang terealisasi 52 orang dengan Persentase Capaian 109%. Pada Tahun 2019 yang mendapat beasiswa sebanyak 39 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2019 tahun ini mengalami peningkatan 1,4%. Jadi jumlah keseluruhan mahasiswa penerima beasiswa dari tahun 2018 – 2020 yaitu sebanyak 110 Orang atau 68,75%. Dari target RPJMD sebanyak 160 Orang masih 50 Orang atau 31,25% yang harus diselesaikan dalam periode Bupati selanjutnya.



Untuk mengetahui rincian masing- masing penerima Beasiswa Utusan Daerah di setiap Universitas Tahun 2018 – 2020 dapat dilihat pada table berikut ini :

Penerima Beasiswa Umum Daerah						
Tahun 2018 - 2020						
NO	Universitas	Alamat	Satuan	Tahun		
				2018	2019	2020
1	PEM Akamigas	Cepu,Jawa Tengah	Orang	0	8	33
2	Institut Pertanian Bogor (IPB)	Bogor,Jawa Barat	Orang	3	5	5
3	STPB	Bandung	Orang	2	4	0
4	Usahid	Jakarta	Orang	0	3	3
5	STTKD	Yogyakarta	Orang	0	11	11
6	STTD	Bali	Orang	12	8	0
7	Universitas Jambi	Mendalo, jambi	Orang	2	0	0
Jumlah				19	39	52
Jumlah Keseluruhan				110		

Sumber; Sekretariat Dikbud 2020


B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 seluruhnya Belanja Operasional, Belanja Modal dan Belanja Hibah sebesar Rp 316.431.602.039.00 Terealisasi sebesar Rp 298.230.181.159.00 dengan persentase realisasi 94,24%. Sisa anggaran 7,76% atau senilai Rp 18.201.420.800.00

Pagu sebesar tersebut dilaksanakan untuk membiayai pencapaian 6 sasaran strategis dengan 10 indikator kinerjanya yang terdistribusi ke dalam 11 program pendidikan dan kebudayaan dan 58 Kegiatan.

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU AWAL	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat			
6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			
7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan			
8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			
9	Program Pemberian Beasiswa Daerah			
10	Program Pengembangan Nilai Budaya			
11	Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan			
	11 Program dan 58 Kegiatan			

Pada table diatas dapat dilihat realisasi keuangannya yang capaian dibawah $\leq 80\%$ yaitu pada :

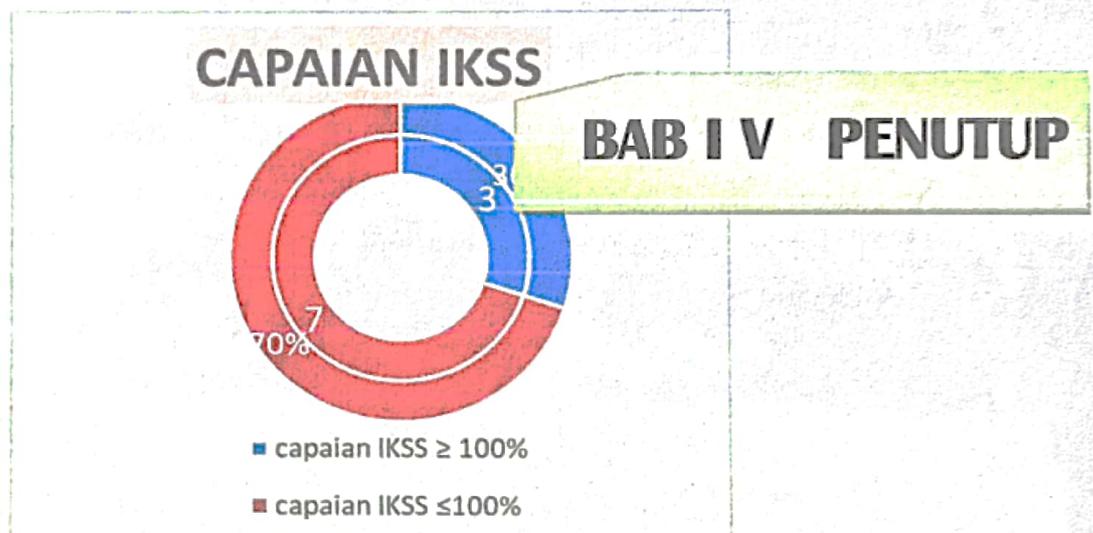
1. Program Peningkatan Penegmbangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi Keuangannya sebesar 77,21 %, Namun secara Fisik Kegiatan tersebut terlaksana 100%. Hal ini dikarenakan efisiensi biaya rapat.
2. Program Pemberian Beasiswa Daerah Realisasi keuangannya 79.74%, hal ini disebabkan Biaya satu semester untuk mahasiswa yang telah lulus seleksi diberbagai Universitas belum dibayarkan, namun Beasiswa tersebut secara fisik sudah 100% ditandai dengan terlampauinya target kinerja 2020 targetnya 38 Orang penerima Beasiswa, terealisasi 52 Orang penerima Beasiswa tahun 2020.

Berikut tabel besaran Dana BOS tahun 2021

DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2020						
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT						
NO	JENIS DANA BOS	Silpa 2019	SD			
			Penerimaan	Tersalurkan	Sisa Dana	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Bos Reguler	366.687.629	29.071.080.000	29.007.346.400	430.421.229	98,54%
2	Bos Afirmasi	1.234.029.200	4.440.000.000	4.840.698.890	833.330.310	85,31%
3	Bos Kinerja	689.000.000	1.560.000.000	2.039.503.222	209.496.778	90,68%
	Jumlah	2.289.716.829	35.071.080.000	35.887.548.512	1.473.248.317	96,06%
NO	JENIS DANA BOS	Silpa 2019	SMP			
			Penerimaan	Tersalurkan	Sisa Dana	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Bos Reguler	58.025.297	9.834.330.000	9.411.236.016	481.119.281	95,14%
2	Bos Afirmasi	1.299.088.500	1.680.000.000	2.828.885.870	150.202.630	94,96%
3	Bos Kinerja	646.000.000	840.000.000	1.339.531.218	146.468.782	90,14%
	Jumlah	2.003.113.797	12.354.330.000	13.579.653.104	777.790.693	94,58%

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan secara umum menunjukkan Penurunan dari tahun sebelumnya, itu capaian sebesar 30% anggaran dan 38,22% progress capaian output. Target penyerapan anggaran yang ditetapkan adalah sebesar 100% atau lebih rendah 5,09% dari realisasinya

Ringkasan Kinerja, dari 6 sasaran Strategis 10 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama) yang Capaian diatas dan atau sama dengan (>100%) ada 3 IKSS, persentase sebanyak 30% sedangkan capaian dibawah (<100%) ada sebanyak 7 IKSS dengan persentase sebesar 70%. seperti tergambar dalam diagram dibawah ini :



Berikut table capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, capaian di atas 100% dan capaian dibawah 100% :

CAPAIAN IKSS DIATAS 100%

IKSS/ IKP	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TAHUN 2020			TARGET AKHIR RENSTRA (2021)	
			Target	Realisasi	Capaian		
1	IKSS1.1	Angka melek huruf penduduk Usia 15 - 59 th	99,49	98,60	99,52	100,93	98,70
7	IKSS4.1	Persentase Lembaga Budaya yang memiliki legalitas	2,20	2,93	3,39	116%	3%
10	IKSS6.1	Jumlah Masyarakat Penerima Beasiswa Prestasi	39 Orang	48 Orang	52 Orang	108,33	160 Orang

CAPAIAN IKSS DIBAWAH 100%

IKSS/ IKP	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TAHUN 2020			TARGET AKHIR RENSTRA (2021)	
			Target	Realisasi	Capaian		
1	IKSS1.1	Angka melek huruf penduduk Usia 15 - 59 th	99,49	98,60	99,52	100,93	98,70
2	IKSS1.2	Angka Rata-rata Lama sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	BPS belum Rilis	7,87 tahun	BPS belum Rilis	0,00	7,95 tahun
4	IKSS2.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,96	99,89	98,52	99%	100%
5	IKSS2.3	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	93,22	99,11	93,22	94%	100%
7	IKSS4.1	Persentase Lembaga Budaya yang memiliki legalitas	2,20	2,93	3,39	116%	3%
8	IKSS4.2	Jumlah Hasil karya Individu yang memiliki HAKI	3 Karya	1 karya	0,00	0%	5 karya
9	IKSS5.1	Nilai AKIP	69,07	70,00	blm Penilaian	0	70

Bab IV. Penutup

Dari hasil pengukuran dan penilaian Indikator Kinerja Utama dan realisasi hasil kinerja keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian indikator yang terendah menjadikan masukan bagi pemangku kebijakan dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan menjadikannya sebagai isu strategis pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Capaian hasil kinerja keuangan yang belum mencapai target Pada beberapa Program/Kegiatan perlu ditinjau kembali penyebabnya, apabila dikarenakan faktor lain selain efisiensi anggaran maka perlu dilakukan peningkatan capaian melalui penerapan sistem manajemen yang lebih baik.

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain :

1. Kurangnya pelaku budaya yang ahli dibidangnya, serta tidak ada Fasilitas Sarana dan Prasarana yang mendukung berkembangnya Seni Budaya;
2. Belum semua Penduduk memperoleh Layanan Akses PAUD yang berkualitas;
3. Kualifikasi, Kompetensi, Distribusi, dan Quantitas Guru belum berada pada Kondisi yang ideal di semua Kecamatan;
4. Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas belum Optimal; dan
5. Standar Sarana dan Prasarana Sekolah belum berada pada kondisi ideal.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, akan mengambil langkah-langkah strategis baik berupa penyesuaian Renstra, perubahan atau penajaman Indikator Kinerja dalam rangka tercapainya Target Kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Dengan ketercapaian tersebut dapat mewujudkan Visi kabupaten Tanjung Jabung Barat umumnya yaitu : *Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas* dan Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu : *Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, Berakhlak, Berbudaya dan Kompetitif.*

Kuala Tungkal, 2023

**Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,**



H. DAHLAN.Sos.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670108 199102 1 001

Bab IV. Penutup